

# INDEK TRI HITA KARANA DI KOTA DENPASAR TAHUN 2024

A. A. Ngr. Anom Kumbara  
Nanang Sutrisno  
Cok Istri Ratna Sari Dwi



Bappeda Kota Denpasar  
&  
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana  
2024

INDEKS TRI HITA KARANA DI KOTA DENPASAR TAHUN 2024

2024

denpasar  
the heart of bali

# **INDEKS TRI HITA KARANA DI KOTA DENPASAR TAHUN 2024**



**Disusun oleh**

A. A. Ngurah Anom Kumbara

Nanang Sutrisno

Cok Istri Ratna Sari Dewi

**KERJA SAMA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
&  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS UDAYANA  
2024**

**Indeks *Tri Hita Karana* di Kota Denpasar Tahun 2024**  
**@ 2024**

Penyusun

A. A. Ngurah Anom Kumbara; Nanang Sutrisno;

Cok Istri Ratna Sari Dewi

15 cm x 23 cm

80 hal

Desain Cover

Nanang Sutrisno

Terselenggara atas kerja sama

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar  
dan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana.

Hak cipta atas buku ini sepenuhnya menjadi Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Kota Denpasar





## **VISI DAN MISI PEMERINTAH KOTA DENPASAR**

### **VISI**

"Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju"

### **MISI**

1. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan;
2. Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan dan Kesiapsiagaan Bencana;
3. Kejujuran dan Spirit *Sewakadarma* sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*);
4. Unggul dalam kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan berbasis *Tri Hita Karana*;
5. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat berlandaskan Kebudayaan Bali.



## DAFTAR ISI

Halaman Sampul

Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar

Daftar Isi .... v

Pengantar .... vii

Sambutan Kepala Bappeda Kota Denpasar.... ix

Daftar Gambar dan Diagram .... xi

Daftar Tabel.... xii

### **BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Tujuan dan Manfaat ..... 5

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 7**

2.1 Deskripsi Konseptual..... 7

2.2 Landasan Teori..... 11

2.3 Variabel dan Indikator..... 7

### **BAB III METODE PENELITIAN..... 19**

3.1 Rancangan Penelitian..... 19

3.2 Teknik Penentuan Populasi dan Sampel..... 19

3.3 Teknik Pengumpulan Data..... 20

3.4 Teknik Analisis Data..... 21

### **BAB IV PROFIL KOTA DENPASAR..... 23**

4.1 Sejarah Kota Denpasar..... 23

4.2 Kondisi Demografis dan Pemanfaatan Lahan.. 29

4.3 Kependudukan..... ✍ 33

4.4 Tiga Parameter Modernitas..... ✍ 35

**BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN ..... ✍ 39**

5.1 Profil Responden..... ✍ 39

5.2 Indeks *Tri Hita Karana* di Kota Denpasar..... ✍ 42

5.3 Analisis Kekuatan dan Kelemahan..... ✍ 55

5.4 Analisis Komparasi..... ✍ 57

**BAB VI PENUTUP..... ✍ 59**

6.1 Simpulan..... ✍ 59

6.2 Rekomendasi..... ✍ 59

**DAFTAR PUSTAKA..... ✍ 61**





## PENGANTAR

*Om Swastyastu,*

**P**ujastuti dan rasa *angayubagya* yang tulus dihaturkan ke hadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan karunia-Nya, sehingga buku ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Buku ini memaparkan hasil pengukuran indeks *Tri Hita Karana* di Kota Denpasar tahun 2024.

Indeks *Tri Hita Karana* disusun dengan metode survei terhadap 400 responden warga Kota Denpasar. Survei ini dilakukan untuk mengevaluasi capaian kinerja pembangunan berbasis budaya di Kota Denpasar yang bersentuhan dengan *Tri Hita Karana* sebagai inti nilai (*core value*) kebudayaan Bali. Pada prinsipnya, pembangunan berwawasan budaya menjadi implementasi nyata dari *Tri Hita Karana*.

*Tri Hita Karana* merupakan nilai dasar kebudayaan Bali yang menekankan terwujudnya hubungan harmonis manusia dengan Tuhan (*parhyangan*), sesama manusia (*pawongan*), dan alam-lingkungan (*palemahan*). Ketiganya dipraktikkan di seluruh aspek kehidupan masyarakat, yakni tata keagamaan, tata kemasyarakatan, dan tata lingkungan. *Tri Hita Karana* sebagai basis pembangunan bermakna bahwa Pemerintah Kota Denpasar memiliki komitmen kuat untuk melestarikan kebudayaan Bali dan menjadikannya spirit transformasi untuk menggerakkan pembangunan yang terarah, terencana, serta berkesinambungan (*sustainable development*).

Pembangunan berbasis *Tri Hita Karana* mengisyaratkan satu bentuk kecerdasan Pemerintah Kota Denpasar dalam menyikapi tren perubahan global. Kebangkitan peran budaya menjadi bagian penting dari pembangunan di pelbagai belahan dunia dalam rangka merespons modernisasi dan globalisasi. Selain untuk mengatasi ketergantungan terhadap hegemoni model pembangunan Barat, juga pembangunan berbasis kearifan lokal menyasar aspek paling mendasar bagi



masyarakat, yakni sistem nilai, identitas, dan jati diri. Seirama dengan itu, pembangunan berbasis *Tri Hita Karana* sebagai bentuk implementasi misi Pemerintah Kota Denpasar patut diapresiasi dan didukung semua pihak.

Kinerja pembangunan berbasis *Tri Hita Karana* harus dievaluasi secara berkelanjutan sehingga dapat ditingkatkan kualitas dan hasilnya. Dalam upaya inilah penyusunan indeks *Tri Hita Karana* menemukan makna penting sehingga buku ini hadir di meja pembaca sekalian. Tim penyusun menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya sehingga kritik serta saran yang konstruktif dari pembaca sangat dibutuhkan demi penyempurnaannya ke depan.

Akhir kata, tim penyusun menyampaikan terima kasih kepada Walikota beserta Wakil Walikota Denpasar, Kepala Bappeda Kota Denpasar, Rektor Universitas Udayana, Dekan Fakultas Ilmu Budaya, dan semua pihak yang berkontribusi dalam penyusunan buku ini.

Selamat membaca dan semoga bermanfaat!

*Om Santih Santih Santih Om*

Denpasar, 2 Desember 2024

Ketua Tim Peneliti



A. A. Ngurah Anom Kumbara

# SAMBUTAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR

*Om Swastyastu,*

Puja dan puji dihaturkan kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, Tuhan Yang Maha Esa atas *asung kerta wara nugraha*-Nya yang tiada terhingga. Tanpa anugerah dan karunia-Nya, buku “Indeks *Tri Hita Karana* Kota Denpasar Tahun 2024” tidak mungkin dapat selesai. Buku ini sangat kami harapkan sebagai dokumen evaluasi kinerja Pemerintah Kota Denpasar.

Pemerintah Kota Denpasar menetapkan visi “Kota Kreatif Berbasis Budaya untuk Denpasar Maju”. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kota Denpasar telah menjabarkan ke dalam lima misi. Pembangunan berbasis *Tri Hita Karana* mengejawantahkan misi keempat, yakni “Unggul dalam kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan berbasis *Tri Hita Karana*.” Artinya, *Tri Hita Karana* harus menjadi dasar dalam membentuk SDM berkualitas unggul yang mampu menguasai teknologi, kreatif, dan inovatif sehingga tercipta keharmonisan di semua aspek kehidupan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Namun semuanya harus dievaluasi secara berkala dan berkelanjutan, salah satunya melalui penyusunan indeks *Tri Hita Karana* yang dilaksanakan setiap tahun. Tujuan penyusunan indeks ini tiada lain untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan di Kota Denpasar, baik pada bidang tata keagamaan (*parhyangan*), kemasyarakatan (*pawongan*), maupun alam-lingkungan (*palemahan*). Selain itu, indeks *Tri Hita Karana* juga digunakan sebagai evaluasi capaian target kinerja Pemerintah Kota Denpasar pada misi ke-4.

*Astungkara*, hasil indeks *Tri Hita Karana* tahun 2024 menunjukkan angka **83,12** sehingga melampaui target sebesar **83** sebagaimana tertuang *RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar 2021-2026*. Walaupun target telah tercapai, namun bukan berarti bahwa pembangunan berbasis *Tri Hita Karana* telah berjalan ideal seperti yang diharapkan. Hasil indeks ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan bidang *pawongan* dan *palemahan* harus terus didorong agar mencapai indeks yang sebanding dengan indeks bidang *parhyangan*. Temuan ini harus menjadi motivasi dan skala prioritas bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Denpasar dalam merancang dan melaksanakan program-program ke depan.

Akhir kata, saya haturkan terima kasih kepada Bapak Walikota dan Wakil Walikota Denpasar, Rektor Universitas Udayana, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, serta Tim Penyusun, atas kerja sama yang terbangun selama ini. Semoga *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* menganugerahi kesehatan dan kebahagiaan kepada kita semua.

*Om Santih Santih Santih Om.*

Denpasar, 2 Desember 2024

Kepala Badan Perencanaan

dan Pembangunan Daerah Kota Denpasar



Pada Wijaya Kusuma, ST, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19671007 199703 1 004

## DAFTAR GAMBAR DAN DIAGRAM

Gambar 4.1	Peta Administratif Kota Denpasar	30
Diagram 5.1	Indeks <i>Parhyangan</i> di Kota Denpasar Tahun 2024	46
Diagram 5.2	Indeks <i>Pawongan</i> di Kota Denpasar Tahun 2024	50
Diagram 5.3	Indeks <i>Palemahan</i> di Kota Denpasar Tahun 2024	54



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Sistem Pemerintahan dan Kepala Daerah Kota Denpasar	28
Tabel 4.2	Pemanfaatan Lahan Kota Denpasar Tahun 2020	32
Tabel 4.3	Komposisi Penduduk per Kecamatan, Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023	33
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Kota Denpasar Menurut Usia Tahun 2023	34
Tabel 5.1	Profil Responden menurut Usia dan Jenis Kelamin	39
Tabel 5.2	Profil Responden menurut Tingkat Pendidikan	40
Tabel 5.3	Profil Responden menurut Jenis Pekerjaan	41
Tabel 5.4	Profil Responden menurut Agama	41
Tabel 5.5	Akses Pendidikan Agama dan Keagamaan	43
Tabel 5.6	Sikap Keagamaan yang Inklusif dan Toleran	43
Tabel 5.7	Tri Kerukunan Umat Beragama	44
Tabel 5.8	Kebebasan dan Kenyamanan Beribadah	44
Tabel 5.9	Peran Lembaga Keagamaan	45
Tabel 5.10	Pemerataan Akses Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi	47
Tabel 5.11	Keterbukaan Akses Informasi Publik	47
Tabel 5.12	Kualitas Pelayanan Publik	48
Tabel 5.13	Situasi dan Kondisi Kamtibmas	48
Tabel 5.14	Kohesi Sosial	49
Tabel 5.15	Kualitas Lingkungan	51
Tabel 5.16	Kinerja Pengelolaan Sampah	51
Tabel 5.17	Kualitas Infrastruktur Publik	52
Tabel 5.18	Kualitas Tata Ruang dan Wilayah	52
Tabel 5.19	Kualitas Ruang Publik	53
Tabel 5.20	Pengaruh Subindikator terhadap Capaian Indikator	55
Tabel 5.21	Pengaruh Indikator terhadap Capaian Variabel	56
Tabel 5.22	Perbandingan Indeks <i>Tri Hita Karana</i> Tahun 2023 dan 2024	57



# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### 1.1 Latar Belakang

**K**ota Denpasar telah bertransformasi menjadi wilayah metropolitan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, kependudukan, serta kepariwisataan yang demikian cepat dan massif. Transformasi ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Pemerintah Kota Denpasar dalam merancang program-program pembangunan yang produktif dan inovatif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kota Denpasar telah menetapkan visi “Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”. Visi ini pun diimplementasikan dalam misi pembangunan Kota Denpasar yang menyorot lima aspek, sebagai berikut.

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan;
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya Kamtibmas, ketahanan pangan dan kesiapsiagaan bencana;
3. Kejujuran dan spirit *sewakadarma* sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis *Tri Hita Karana*; dan,
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan Kebudayaan Bali.



Visi dan misi tersebut menegaskan bahwa kebudayaan menjadi basis pembangunan di Kota Denpasar, yakni fondasi dalam berkreasi dan berinovasi demi terwujudnya kemajuan masyarakat. *Tri Hita Karana* merupakan inti nilai (*core value*) kebudayaan Bali yang mengedepankan harmoni hubungan manusia dengan Tuhan (*parhyangan*), sesama (*pawongan*), serta alam-lingkungan (*palemahan*). Artinya, pembangunan berbasis budaya mengisyaratkan pentingnya: (a) penguatan sistem nilai; (b) pemberdayaan kreativitas, inovasi, dan etos kerja masyarakat; dan (c) lingkungan yang kondusif, didukung dengan infrastruktur, fasilitas, sarana, dan prasarana publik yang berkualitas.

Pemosisian kebudayaan sebagai paradigma baru (*new paradigm*) pembangunan sesungguhnya merupakan wacana global dalam tiga dekade terakhir. Kebangkitan peran budaya dalam pembangunan yang lebih adaptif dan afirmatif terhadap nilai-nilai tradisional, diharapkan mampu mengatasi paradoks modernitas. Pada satu sisi, paradigma ini dapat menciptakan ketahanan budaya masyarakat dalam menyikapi perubahan sosiokultural yang begitu cepat dan massif. Namun pada sisi yang lain, juga kesejahteraan ekonomi dan kemajuan sosial yang dicita-citakan masyarakat dapat dicapai berlandaskan nilai-nilai budayanya (Harrison & Huntington, 2006).

Studi-studi modernisasi dan globalisasi pada umumnya memang menaruh perhatian yang besar pada interaksi antara budaya modern dan budaya tradisional. Modernisasi menjadi kekuatan penting dalam transformasi masyarakat tradisional (agraris-feodalistik) ke masyarakat modern (industri-kapitalis) (Stzompka, 2010; Sanderson, 2011). Diferensiasi struktural, pluralitas nilai, dan otonomi subjek juga menjadi konsekuensi tidak terhindarkan dari proses-proses sosial modern (Simmel, 1982; Berger, 1990; Lash, 1999). Pergeseran nilai tradisional ke modern ini tentu menyuguhkan tantangan tersendiri dalam transformasi masyarakat Kota Denpasar.

Triguna (2011) menegaskan bahwa modernitas hadir untuk mengenalkan berbagai nilai baru sehingga setiap orang yang pengetahuannya telah tersentuh oleh modernisasi akan

memberikan makna baru terhadap berbagai tatanan yang ada sebelumnya, bahkan pada hal-hal normatif, seperti moralitas, adat, tradisi, dan agama. Oleh karena itu, kemampuan adaptif masyarakat terhadap modernisasi dan globalisasi diperlukan agar mampu berenang di tengah derasnya perubahan, tanpa kehilangan identitas dan jati diri budayanya. Gagasan tentang kemajuan dan kesejahteraan sosial yang ditawarkan budaya modern mesti didialogkan dengan nilai-nilai tradisional karena pada hakikatnya, gagasan tersebut juga terkandung di dalam budaya tradisional.

Modernisasi yang dihadapi masyarakat Kota Denpasar terbukti mendorong berbagai perubahan, baik pada dimensi keagamaan, hubungan-hubungan sosial, maupun tata ruang, wilayah, dan lingkungan. Artinya, perubahan menyentuh tiga nilai kebudayaan Bali (*Tri Hita Karana*) sehingga diperlukan upaya-upaya strategis untuk mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan. Transisi masyarakat tradisional ke modern yang sedang dihadapi masyarakat Kota Denpasar sekarang ini terbukti telah mendorong pelbagai paradoks sosiokultural. Ketika berbagai kemajuan material dicapai masyarakat, maka pada saat bersamaan, masalah-masalah sosial dan budaya pun meningkat ekskalasinya.

Paparan di atas mengisyaratkan bahwa pembangunan berbasis budaya mempunyai makna penting bagi pemerintah dan masyarakat Kota Denpasar, terutama untuk menghadapi dampak negatif modernisasi pada pelbagai ranah kehidupan. Kebudayaan Bali sebagai modal dasar pembangunan harus menjadi kekuatan intrinsik (*inner power*) serta motivasi untuk berprestasi (*motivation to achievement*) yang semakna dengan prinsip *taksu* dan *jengah*. Untuk itu, *Tri Hita Karana* sebagai inti nilai dan landasan kebudayaan Bali harus menjadi prinsip pengarah (*guiding principles*) pembangunan Kota Denpasar yang menekankan keharmonisan seluruh dimensi kehidupan masyarakat secara holistik dan berkelanjutan.

Secara etimologis, *Tri Hita Karana* berarti tiga penyebab kebahagiaan hidup, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan (*parhyangan*), sesama manusia (*pawongan*),

dan manusia dengan alam-lingkungan (*palemahan*). Konsep ini merupakan kristalisasi nilai esensial kebudayaan Bali yang dilandasi ajaran agama Hindu. Ketiganya menjadi sistem nilai, prinsip pengarah, dan ranah kehidupan masyarakat Bali yang diimplementasikan dalam praktik keseharian. *Tri Hita Karana* sebagai paradigma pembangunan di Kota Denpasar harus dilaksanakan secara integral, holistik, dan berkelanjutan.

Pembangunan Kota Denpasar berbasis *Tri Hita Karana* menjadi semakin penting dilakukan seiring dengan degradasi nilai di bidang tata keagamaan, tata kemasyarakatan, dan tata lingkungan, di antaranya sebagai berikut.

- a. Pada bidang *parhyangan*, menguatnya sekularisasi dan privatisasi agama yang ditandai dengan hadirnya praktik-praktik keagamaan baru yang sering kali tidak sejalan dengan praktik beragama kolektif. Selain itu, gejala eksklusivisme, radikalisme, serta esktrémisme agama, juga berpotensi mengganggu kerukunan umat beragama, terutama di Kota Denpasar yang warganya multietnis dan multiagama.
- b. Pada bidang *pawongan*, menguatnya potensi konflik-konflik sosial, kriminalitas, aksi premanisme, dinamika urban, dan gangguan kamtibmas lainnya, merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Kota Denpasar pada era modern ini.
- c. Pada bidang *palemahan*, karut-marutnya tata ruang dan wilayah, menurunnya kualitas lingkungan hidup, penanganan sampah, dan sebagainya, juga potensial mendegradasi hubungan harmonis manusia dengan alam-lingkungannya.

Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa *Tri Hita Karana* sebagai basis pembangunan Kota Denpasar harus mendapat atensi serius, baik dari pemerintah, pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan seluruh komponen masyarakat. Tingkat keberhasilan pembangunan di Kota Denpasar, semestinya juga dinilai dan dievaluasi secara periodik berdasarkan ketiga aspek tersebut (*Tri Hita Karana*). Mengingat setiap aspek ini

bersifat dinamis, seiring dengan perubahan sosial dan budaya masyarakat Kota Denpasar. Ketika alam-lingkungan berubah, maka kesadaran manusia akan berubah, dan pada gilirannya, sistem nilai yang dianut masyarakat pun berubah. Oleh sebab itu, penilaian secara periodik terhadap indeks *Tri Hita Karana* di Kota Denpasar menemukan urgensi dan signifikansinya.

Dokumen *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar 2021-2026* atau *RPJMD Kota Denpasar 2021-2026*, telah menetapkan indeks *Tri Hita Karana* sebagai salah satu instrumen untuk menilai dan mengevaluasi kinerja pembangunan di Kota Denpasar. Indeks ini secara spesifik diarahkan untuk mengukur capaian visi dan misi pemerintah, khususnya pada misi yang keempat, yakni “Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis *Tri Hita Karana*”. Artinya, keseimbangan pembangunan di tiga ranah kehidupan masyarakat berbasis *Tri Hita Karana* adalah indikator utama tercapainya misi tersebut.

Target capaian pembangunan di Kota Denpasar yang sejalan dengan misi tersebut pada masa akhir RPJMD 2021-2026 adalah “86”. Untuk merealisasikan target tersebut, maka Pemerintah Kota Denpasar melakukan pengukuran indeks *Tri Hita Karana* setiap tahun. Berdasarkan hal tersebut, buku ini menyajikan hasil survei tentang indeks *Tri Hita Karana* di Kota Denpasar tahun 2024.

## **1.2 Tujuan dan Manfaat**

### **1.2.1 Tujuan**

Pengukuran dan penetapan indeks *Tri Hita Karana* di Kota Denpasar tahun 2024 bertujuan untuk:

1. Menilai dan mengevaluasi pembangunan berbasis *Tri Hita Karana* di Kota Denpasar tahun 2024.
2. Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan pemerintah Kota Denpasar dalam rangka mewujudkan pembangunan berbasis *Tri Hita Karana* secara integral dan berkelanjutan.



### 1.2.2 Manfaat

Dokumen akademis tentang indeks *Tri Hita Karana* di Kota Denpasar tahun 2024 diharapkan bermanfaat bagi:

1. Pemerintah Kota Denpasar sebagai bahan kajian dan evaluasi untuk meningkatkan pembangunan berbasis *Tri Hita Karana* secara integral dan berkelanjutan.
2. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Denpasar sebagai bahan kajian, serta evaluasi dalam merencanakan program-program pembangunan yang kreatif dan inovatif berbasis *Tri Hita Karana*.
3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Denpasar, sebagai bahan kajian dalam perencanaan, eksekusi, monitoring, serta evaluasi program kerja tahun 2025, terutama untuk meningkatkan kualitas pembangunan pada ranah *parhyangan, pawongan, dan palemahan*.



## BAB II

# KAJIAN PUSTAKA

---

### 2.1 Deskripsi Konseptual

Penetapan indeks *Tri Hita Karana* Kota Denpasar tahun 2025 dilakukan melalui serangkaian penelitian ilmiah dengan mengacu pada konsep, teori, dan metodologi yang valid. Kriteria validitas ini dicapai melalui kajian pustaka (*literature review*) untuk mendeskripsikan berbagai konsep, variabel, dan teori yang digunakan, sebagaimana dipaparkan dalam sub-subabb berikut ini.

#### 2.1.1 Indeks

Indeks merupakan sajian data berdasarkan pengukuran atas kinerja sekelompok data. Penyusunan indeks dalam ilmu statistik dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan tertentu yang diterapkan pada beberapa komponen. Definisi indeks (*index*) menurut *Webster Merriam-Webster Dictionary* (2019) adalah sebagai berikut.

*“A number (such as a ratio) derived from a series of observations and used as an indicator or measure; the ratio of one dimension of a thing (such as an anatomical structure) to another dimension; and something (such as a physical feature or a mode of expression) that leads one to a particular fact or conclusion”*

Suatu bilangan (seperti rasio) yang diperoleh dari serangkaian observasi dan digunakan sebagai indikator atau ukuran; rasio dari satu dimensi sesuatu (seperti, struktur anatomi) ke dimensi lain; dan sesuatu (seperti, ciri fisik suatu benda ataupun cara berekspresi) yang mengarahkan pada fakta atau kesimpulan tertentu.



OECD (2008) menyamakan indeks dengan indikator, yakni “*A quantitative or a qualitative measure derived from a series of observed facts that can reveal relative positions (e.g. of a country) in a given area. When evaluated at regular intervals, an indicator can point out the direction of change across different units and through time.*” (‘Ukuran kuantitatif atau kualitatif yang diperoleh dari serangkaian fakta observasi yang dapat mengungkapkan posisi relatif (misalnya, suatu negara) pada suatu wilayah tertentu. Jika dievaluasi secara berkala, suatu indikator dapat menunjukkan arah perubahan di berbagai unit dan waktu’).

Menurut Silalahi (2015), indeks adalah kombinasi dari berbagai butir (*item*) menjadi skor numerik tunggal. Berbagai komponen atau subbagian dari setiap komponen itu diukur, kemudian digabungkan menjadi satu ukuran. Senada dengan itu, Neuman (2013) menyatakan bahwa indeks merupakan hasil penjumlahan atau penggabungan dari berbagai ukuran konstruk atau *variable* terpisah untuk menciptakan satu skor tunggal. Folz (1997) menegaskan bahwa indeks merupakan ukuran gabungan dari skor dalam item-item individual yang berhubungan dengan satu konsep khusus. Indeks merupakan kombinasi dua atau lebih item atau indikator, yakni gabungan ukuran tentang suatu konsep (Nachnias & Nachnias, 1987).

Dari sejumlah definisi di atas dapat disimpulkan bahwa indeks (*index*) merupakan ukuran kuantitatif ataupun kualitatif yang diturunkan dari serangkaian fakta yang diamati, dan dapat mengungkapkan posisi relatif keadaan tertentu. Apabila dievaluasi secara berkala, maka indeks dapat menunjukkan adanya perubahan pada berbagai unit dalam rentang waktu yang berbeda. Indeks dapat disusun dalam bentuk indeks tunggal (*single index*) maupun indeks gabungan (*composite index*) berdasarkan kompleksitas indikator yang diukur.

Indeks tunggal adalah ukuran terhadap satu indikator (indikator tunggal) yang disusun dalam suatu daftar, misalnya Indeks Harga Konsumen (IHK). Sementara indeks komposit merupakan gabungan beberapa indikator yang multidimensi, kompleks, dan melibatkan sejumlah aspek yang tidak dapat

diungkap melalui satu indikator. Salah satu contohnya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggabungkan indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran. Dari kedua jenis indeks tersebut, indeks *Tri Hita Karana* disusun dalam bentuk indeks komposit (*composite index*), yakni dengan cara menggabungkan tiga indikator yang terdiri atas *parhyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*.

Guna mengukur dan menetapkan indeks *Tri Hita Karana* di Kota Denpasar, dilakukan 10 (sepuluh) langkah penelitian, sebagai berikut.

- (1) *Menyusun kerangka konseptual*. Kerangka konseptual dibangun dan dikembangkan untuk menetapkan dasar pemilihan indeks komposit dengan berlandaskan pada prinsip kesesuaian tujuan;
- (2) *Identifikasi indikator*. Indikator diidentifikasi dan disusun berdasarkan kesehatan analitis, keterukuran, cakupan wilayah, relevansi indikator yang diukur, dan kaitan dari seluruh komponen tersebut;
- (3) *Restrukturisasi indikator*. Analisis eksplorasi dilakukan dengan menyelidiki secara holistik struktur indikator, menilai kesesuaian kumpulan data, serta menjelaskan pilihan metodologis dalam pembobotan dan agregasi;
- (4) *Pengolahan atau kompilasi data*. Data dikumpulkan dan diolah berdasarkan pendekatan yang digunakan. Ketika ditemukan nilai ekstrem pada suatu indikator, maka nilai tersebut harus diperiksa karena dapat menjadi ukuran yang tidak diharapkan;
- (5) *Standardisasi indikator*. Indikator harus dinormalisasi sehingga dapat dibandingkan satu sama lain. Perhatian perlu diberikan pada nilai-nilai yang ekstrem karena bisa memengaruhi komponen lain dalam menentukan indeks komposit. Data yang bersifat ‘miring’ (tidak logis) juga harus diidentifikasi dan dipertanggungjawabkan secara khusus;
- (6) *Pembentukan bobot penimbang*. Indikator digabungkan dan diberikan bobot sesuai dengan kerangka teoretis tertentu. Korelasi dan kompensasi antarindikator perlu

- dipertimbangkan, dikoreksi, serta diperlakukan sebagai fitur fenomena yang perlu dipertahankan dalam analisis;
- (7) *Agregasi*. Indikator gabungan yang sudah dibandingkan disusun dalam bentuk agregat supaya dapat ditentukan tingkat capaian dari ukuran yang ditetapkan;
  - (8) *Uji kekuatan dan kepekaan*. Analisis dilakukan untuk mengukur ketahanan indeks komposit, seperti indikator tunggal, skema normalisasi, imputasi data, penetapan bobot, serta metode agregasi;
  - (9) *Back to detail*. Indeks harus bersifat transparan, cocok, dan relevan dengan indikator atau nilai dasar. Upaya ini harus dilakukan dengan menghubungkan antara indeks dan indikator lain melalui identifikasi keterkaitan regresi;
  - (10) *Penyajian Hasil*. Indeks divisualisasikan atau disajikan setelah melalui proses interpretasi berdasarkan kaidah metodologi dalam penyusunan indeks komposit.

### 2.1.2 Tri Hita Karana

*Tri Hita Karana* merupakan konsep yang abstrak, tetapi mengandung arti keselarasan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Konsep ini bentuk oleh tiga kata, yakni *tri* yang berarti tiga, *hita* berarti kebahagiaan, dan *karana* berarti penyebab. Dengan demikian *Tri Hita Karana* berarti tiga penyebab kebahagiaan (Wiana, 2012:5). Ketiga penyebab kebahagiaan tersebut mencakup hubungan harmonis: manusia dengan Tuhan (*parhyangan*), manusia dengan sesama manusia (*pawongan*), dan manusia dengan alam dan lingkungannya (*palemahan*).

Dalam implementasinya, *Tri Hita Karana* juga dipahami sebagai tiga ranah kehidupan masyarakat Hindu di Bali, yakni (a) *parhyangan* sebagai ranah ketuhanan (keagamaan); (b) *pawongan* sebagai ranah sosiokultural (kemasyarakatan); dan (c) *palemahan* sebagai ranah kealaman dan lingkungan (ekologis). *Tri Hita Karana* sebagai sistem nilai masyarakat Bali berfungsi untuk menata keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam-lingkungannya. Jadi, manusia adalah kata kunci (*keywords*) dari implementasi

*Tri Hita Karena* karena manusia memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk membina hubungan harmonis itu. Penataan keseimbangan hubungan ini melahirkan ketenteraman batin, rasa bahagia, kenyamanan hidup, dan kesejahteraan sosial (Geriya, 2010:209-210).

Dalam pembangunan Kota Denpasar berbasis budaya, *Tri Hita Karana* diimplementasikan dalam pembangunan di bidang keagamaan, sosial budaya, serta lingkungan. Selain berporos pada agama Hindu, *Tri Hita Karana* juga mengakar pada nilai kosmologis tentang posisi manusia sebagai entitas mikrokosmis dari alam semesta sebagai entitas makrokosmis, sehingga keberadaannya berhubungan dengan semua unsur alam semesta. Konsep *Tri Hita Karana* yang dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah program-program pembangunan di Kota Denpasar pada bidang keagamaan (*parhyangan*), sosial kemasyarakatan (*pawongan*), serta alam-lingkungan (*palemahan*) sebagai satu kesatuan.

## 2.2 Landasan Teori

Indeks *Tri Hita Karana* di Kota Denpasar diukur dengan berlandaskan pada teori persepsi, yakni respons, tanggapan, atau penilaian masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan pada ranah *Tri Hita Karana* di Kota Denpasar. Persepsi dapat didefinisikan sebagai proses kognitif yang terjadi pada setiap individu dalam menilai sesuatu berlandaskan penginderaan, penghayatan, perasaan, pengalaman, dan penafsiran tentang suatu objek. Persepsi bukanlah pencatatan yang sebenarnya dari sebuah realitas, melainkan realitas seperti yang dipahami dan dimaknai orang yang mempersepsikan (Yunita, 2017:19).

Menurut Hovlad (dalam Effendy, 2013), setiap persepsi melibatkan tiga variabel penting, yakni perhatian, pengertian, dan penerimaan. Ada beberapa hal yang diperlukan sehingga setiap individu menyadari persepsinya, meliputi objek yang dipersepsikan, alat indera atau reseptor, dan perhatian. Hal ini sejalan dengan pendapat Triana (2015:36) bahwa persepsi merupakan proses mental yang terjadi dalam diri individu saat



menanggapi situasi tertentu. Kemudian melalui pikiran dan perasaannya, persepsi dijadikan dasar pertimbangan perilaku individu. Persepsi juga dapat diartikan sebagai pandangan individu atau sekelompok orang terhadap lingkungan yang dipengaruhi oleh kepribadian dan karakteristik yang dimiliki seseorang dalam lingkungannya. Jika objek persepsi bernilai positif, maka ia akan memengaruhi nilai perseptor, baik fisik maupun psikis. Oleh karena itu, persepsi dapat memberikan motivasi bagi perilaku masyarakat dalam rangka beradaptasi dengan lingkungannya.

Persepsi menandai proses dalam diri untuk mengetahui sejauh mana sesuatu yang diterima indera dapat memancing kepekaan individu terhadap lingkungannya. Cara pandang ini menentukan kesan yang dihasilkan dalam proses persepsi. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari cara pandang individu terhadap yang lain, sehingga memunculkan persepsi masyarakat (*public perception*). Persepsi masyarakat menjadi dasar penilaian individu terhadap sesuatu, serta menentukan caranya bersikap dan berperilaku dalam masyarakat. Seturut dengan itu, Martono (2010:27), menyatakan bahwa persepsi masyarakat adalah cara masyarakat memandang persoalan dan sudut pandang yang digunakan dalam mengamati suatu fenomena. Persepsi menjadi kerangka konseptual, perangkat asumsi, nilai, dan gagasan yang akhirnya memengaruhi sikap serta tindakan masyarakat dalam menghadapi situasi.

Persepsi pertama kali muncul akibat stimulus inderawi dan dikembangkan oleh pengalaman. Setiap orang memiliki pengalaman berbeda-beda, sehingga akan timbul bermacam-macam persepsi dan pesan tentang sesuatu yang diamati. Dalam hal ini, pandangan berperan bagi penilaian seseorang terhadap objek yang dilihat dan dirasakan (Robbins, 2015:8). Pemikiran, pengalaman, dan persepsi publik secara holistik akan memengaruhi persepsi individu sehingga hasil persepsi antarindividu pun berbeda-beda.

Ada dua teori utama tentang cara memahami persepsi masyarakat. Pertama, teori persepsi konstruktif bahwa setiap individu mengkonstruksi persepsi secara aktif dengan cara

memilih stimulus dan menggabungkan antara sensasi dan memori. Kedua, teori persepsi langsung (*direct perception*) bahwa persepsi akan terbentuk melalui perolehan informasi secara langsung dari lingkungan (Solso, 2017:120). Kedua persepsi ini dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi perasaan, pengalaman, pemikiran, motivasi, dan kerangka acuan individu dalam mempersepsi sesuatu. Adapun faktor eksternal meliputi stimulus, situasi, dan kondisi lingkungan yang dihadapi individu dalam kehidupannya.

Robbins (dalam Syukhairi, 2015:8) juga menyampaikan beberapa faktor yang memengaruhi persepsi individu, dan/atau, masyarakat sebagai berikut.

1. *Pelaku Persepsi*, tatkala seseorang memandang atau menafsirkan suatu objek yang dilihat, maka penafsiran yang lahir sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku persepsi.
2. *Target atau objek*, karakteristik-karakteristik atau target yang diamati juga dapat memengaruhi hasil persepsi. Hubungan target dan latar belakang pelaku persepsi akan memengaruhi hasil persepsi.
3. *Situasi* berupa aspek-aspek lingkungan, seperti alam, sosial, hukum, budaya, dan ekonomi, juga berpengaruh terhadap persepsi individu atau masyarakat.

Persepsi mencerminkan pengalaman individu tentang objek, peristiwa, atau relasi-relasi tertentu yang dikonstruksi dengan cara menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Rakhmat, 1996). Krech & Crutchfield (1983), menegaskan bahwa persepsi melibatkan faktor fungsional dan struktural. Faktor fungsional menentukan persepsi yang lahir, yakni hasil penilaian subjek terhadap objek yang dihadapi, sedangkan faktor struktural menegaskan bahwa sifat-sifat perseptual dan kognitif substruktur ditentukan oleh sifat-sifat struktur secara menyeluruh karena substruktur dipandang sebagai bagian struktur yang lebih besar. Persepsi yang dihasilkan melalui dua faktor tersebut dapat bersifat asimilasi maupun kontras (Rakhmat, 1996:59).



Berdasarkan teori di atas, indeks *Tri Hita Karana* di Kota Denpasar diukur berdasarkan persepsi masyarakat sebagai subjek pembangunan, baik yang dipengaruhi faktor fungsional maupun struktural. Persepsi masyarakat Kota Denpasar terhadap hasil pembangunan pada ranah keagamaan, sosial kemasyarakatan, dan lingkungan (*Tri Hita Karana*) dijadikan tolak ukur untuk menilai kinerja pembangunan berbasis *Tri Hita Karana*, sebagaimana visi dan misinya. Pembangunan *Tri Hita Karana* niscaya dipersepsikan positif oleh warga Kota Denpasar, jika mampu memenuhi fungsi-fungsi yang mereka harapkan. Pembangunan berbasis *Tri Hita Karana* juga akan dipersepsikan positif, jika sesuai dengan struktur masyarakat. Hal ini juga berlaku sebaliknya bahwa persepsi masyarakat yang bersifat negatif dapat ditentukan oleh faktor fungsional dan struktural.

Berdasarkan landasan teori tersebut, dapat dirumuskan sejumlah asumsi teoretis sebagai pijakan analisis mengenai persepsi masyarakat Kota Denpasar terhadap pembangunan berbasis *Tri Hita Karana*, sebagai berikut.

- (1) Indeks *Tri Hita Karana* di Kota Denpasar tergantung pada persepsi warga Kota Denpasar terhadap kinerja pembangunan di bidang tata keagamaan (*parhyangan*), tata kemasyarakatan (*pawongan*), serta tata lingkungan (*palemahan*).
- (2) Indeks *Tri Hita Karana* di Kota Denpasar tergantung pada sifat fungsional pembangunan berbasis *Tri Hita Karana* dalam kehidupan praksis-aktual. Semakin tinggi fungsi pembangunan pada ketiga bidang tersebut yang dirasakan masyarakat, maka semakin tinggi pula indeks yang dihasilkan, demikian pula sebaliknya.
- (3) Indeks *Tri Hita Karana* di Kota Denpasar tergantung pada kesesuaiannya dengan struktur sosial. Semakin tinggi tingkat kesesuaian pembangunan pada tiga ranah tersebut dengan struktur sosial, maka semakin tinggi pula indeks yang dihasilkan, demikian pula sebaliknya.

## 2.3 Variabel dan Indikator

Indeks *Tri Hita Karana* diukur dengan menggabungkan tiga variabel, yaitu *parhayangan*, *pawongan*, dan *palemahan*. Secara operasional, variabel-variabel tersebut diukur dengan indikator dan subindikator sebagai berikut.

### 2.3.1 Indekator *Parhyangan*

*Parhyangan* bermakna hubungan harmonis manusia dengan Tuhan. Dalam konteks pembangunan, *parhyangan* mencakup seluruh aktivitas pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan bidang keagamaan di Kota Denpasar. Indeks *parhyangan* di Kota Denpasar diukur berdasarkan indikator (I) dan subindikator (Si) sebagai berikut.

1. Akses pendidikan agama dan keagamaan ( $I_1$ )
  - (a) Akses pendidikan agama formal (sekolah) ( $Si_{1.1}$ )
  - (b) Akses pendidikan agama informal (keluarga) ( $Si_{1.2}$ )
  - (c) Akses pendidikan agama nonformal (masyarakat) ( $Si_{1.3}$ )
  - (d) Akses pendidikan agama melalui saluran lain (belajar mandiri, media, dan saluran lainnya) ( $Si_{1.4}$ ).
2. Sikap keagamaan yang inklusif dan toleran ( $I_2$ )
  - (a) Sikap keagamaan yang tidak ekstrem dan radikal ( $Si_{2.1}$ )
  - (b) Sikap keagamaan yang menjunjung tinggi kearifan lokal ( $Si_{2.2}$ )
  - (c) Sikap keagamaan yang tidak diskriminatif terhadap umat beragama lain ( $Si_{2.3}$ )
  - (d) Sikap terbuka individu untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan umat beragama lain ( $Si_{2.4}$ ).
3. Tri kerukunan umat beragama ( $I_3$ )
  - (a) Kerukunan intern umat seagama ( $Si_{3.1}$ )
  - (b) Kerukunan antarumat beragama ( $Si_{3.2}$ )
  - (c) Kerukunan intern dan antarumat beragama dengan pemerintah ( $Si_{3.3}$ )

- (d) Peran pemerintah dalam pencegahan dan penyelesaian konflik-konflik keagamaan ( $Si_{3.4}$ ).
- 4. Kebebasan dan kenyamanan beribadah ( $I_4$ )
  - (a) Kenyamanan dalam menjalankan ibadah sehari-hari ( $Si_{4.1}$ )
  - (b) Kebebasan dalam melaksanakan ibadah kolektif ( $Si_{4.2}$ )
  - (c) Kebebasan melaksanakan aktivitas keagamaan di tempat suci ( $Si_{3.3}$ )
  - (d) Dukungan warga sekitar dalam pelaksanaan ibadah keagamaan ( $Si_{3.4}$ ).
- 5. Peran lembaga keagamaan ( $I_5$ )
  - (a) Peran lembaga keagamaan dalam pembinaan umat ( $Si_{5.1}$ )
  - (b) Peran lembaga keagamaan dalam menyikapi persoalan-persoalan keumatan ( $Si_{5.2}$ )
  - (c) Peran lembaga keagamaan dalam mendukung kebijakan pemerintah ( $Si_{5.3}$ )
  - (d) Kepatuhan terhadap seruan, imbauan, serta keputusan lembaga keagamaan ( $Si_{5.4}$ ).

### 2.3.2 Indikator *Pawongan*

*Pawongan* berarti hubungan harmonis antarsesama manusia. Dalam konteks pembangunan, ranah *pawongan* mencakup seluruh aktivitas pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan tata kemasyarakatan. Indeks *pawongan* di Kota Denpasar diukur dengan indikator ( $I$ ), serta subindikator ( $Si$ ) sebagai berikut.

- 1. Pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi ( $I_1$ )
  - (a) Akses pendidikan pada semua jenjang ( $Si_{1.1}$ )
  - (b) Akses kesehatan yang merata dan berkualitas ( $Si_{1.2}$ )
  - (c) Akses usaha dan lapangan pekerjaan ( $Si_{1.3}$ )
  - (d) Peran serta dan fungsi pemerintah ( $Si_{1.4}$ ).

2. Keterbukaan Akses Informasi Publik ( $I_2$ )
  - (a) Sosialisasi kebijakan dan program pemerintah ( $Si_{2.1}$ )
  - (b) Kemudahan akses informasi publik melalui media internet ( $Si_{2.2}$ )
  - (c) Optimalisasi ruang publik untuk menyampaikan informasi pemerintah ( $Si_{2.3}$ )
  - (d) Transparansi program pembangunan di desa/kelurahan ( $Si_{2.4}$ ).
3. Kualitas Pelayanan Publik ( $I_3$ )
  - (a) Digitalisasi pelayanan publik ( $Si_{3.1}$ )
  - (b) Pelayanan cepat, tepat, dan murah ( $Si_{3.2}$ )
  - (c) Sikap petugas pelayanan publik ( $Si_{3.3}$ )
  - (d) Pelayanan tanpa diskriminasi ( $Si_{3.4}$ ).
4. Situasi dan kondisi Kamtibmas ( $I_4$ )
  - (a) Persepsi umum kondisi Kamtibmas ( $Si_{4.1}$ )
  - (b) Upaya pemerintah dalam Kamtibmas ( $Si_{4.2}$ )
  - (c) Partisipasi masyarakat dalam Kamtibmas ( $Si_{4.3}$ )
  - (d) Sinergitas antarlembaga dalam Kamtibmas ( $Si_{4.4}$ )
5. Kohesi sosial ( $I_5$ )
  - (a) Kerukunan antarwarga ( $Si_{5.1}$ )
  - (b) Kepedulian sosial antarwarga ( $Si_{5.2}$ )
  - (c) Kesamaan hak dan kewajiban warga ( $Si_{5.3}$ )
  - (d) Pelibatan partisipasi warga tanpa memandang suku, ras, agama, dan golongan ( $Si_{5.4}$ )

### 2.3.3 Indikator *Palemahan*

*Palemahan* bermakna hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam-lingkungannya demi keberlangsungan hidupnya. Dalam konteks pembangunan, variabel *palemahan* mencakup peran pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang berkualitas dan ruang aktivitas yang layak dan produktif bagi warga Kota Denpasar. Berdasarkan variabel tersebut, indeks *palemahan* di Kota Denpasar diukur menurut indikator (I) dan subindikator (Si) sebagai berikut.

1. Kualitas Lingkungan ( $I_1$ )
  - (a) Keasrian dan keindahan lingkungan ( $Si_{1.1}$ )
  - (b) Ketersediaan air bersih dan sehat ( $Si_{1.2}$ )
  - (c) Kondisi polusi udara ( $Si_{1.3}$ )
  - (d) Kondisi drainase, trotor, dan jalan raya ( $Si_{1.4}$ ).
2. Kinerja Pengelolaan sampah ( $I_2$ )
  - (a) Kinerja pemerintah dalam penanganan sampah ( $Si_{2.1}$ )
  - (b) Kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan 3R (*reduce, reuse, recycle*) ( $Si_{2.2}$ )
  - (c) Kinerja pengelolaan sampah di *banjar*/desa ( $Si_{2.3}$ )
  - (d) Sinergitas pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah ( $Si_{2.4}$ ).
3. Kualitas Infrastruktur dan Fasilitas Umum ( $I_3$ )
  - (a) Kualitas infrastruktur transportasi ( $Si_{3.1}$ )
  - (b) Kualitas infrastruktur perekonomian ( $Si_{3.2}$ )
  - (c) Kualitas infrastruktur pelayanan publik ( $Si_{3.3}$ )
  - (d) Kualitas fasilitas umum ( $Si_{3.4}$ )
4. Kualitas Tata Ruang dan Wilayah ( $I_4$ )
  - (a) Kualitas tata ruang dan wilayah pemukiman ( $Si_{4.1}$ )
  - (b) Eksistensi lahan pertanian dan jalur hijau ( $Si_{4.2}$ )
  - (c) Kualitas taman bermain dan tempat rekreasi keluarga ( $Si_{4.3}$ )
  - (d) Keberadaan ruang terbuka hijau ( $Si_{4.4}$ )
5. Kualitas ruang publik ( $I_5$ )
  - (a) Kondisi umum ruang publik ( $Si_{5.1}$ )
  - (b) Ketersediaan lahan parkir pada ruang publik ( $Si_{5.2}$ )
  - (c) Ketersediaan tempat sampah dan toilet umum di ruang publik ( $Si_{5.3}$ )
  - (d) Kualitas ruang publik dalam menunjang kreativitas warga ( $Si_{5.4}$ )



## BAB III

# METODE PENELITIAN

---

### 3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini dirancang dengan pendekatan deskriptif-kuantitatif melalui metode survei. Menurut Zikmund (1997), metode survei merupakan teknik penelitian untuk mengumpulkan informasi atau data dari sejumlah orang (*sampel*) melalui pertanyaan terstruktur atau kuisioner. Survei bertujuan untuk mengungkap persepsi, opini, atau pendapat masyarakat terhadap topik yang dikaji sehingga diperoleh penjelasan tentang kecenderungan umum yang terjadi pada objek penelitian.

### 3.2 Teknik Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh penduduk Kota Denpasar. Berdasarkan data dalam *Kota Denpasar dalam Angka 2024* (BPS Kota Denpasar, 2024), jumlah penduduk Kota Denpasar tahun 2023 adalah 660.984 jiwa. Dengan demikian, jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 660.984 responden. Mengingat jumlah populasi tersebut cukup besar, maka sampel responden ditetapkan dengan rumus Slavin (dalam Sevila, *et al.*, 1960:182), sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

n : Sampel

N: Populasi

e : batas toleransi kesalahan (5 %)

Berdasarkan rumus di atas ditetapkan jumlah sampel yang diteliti dihitung sebagai berikut.

$$\begin{aligned} n &= 660.984 / 1 + 660.984 (0.05)^2 \\ &= 660.984 / 1.653,46 \\ &= 399,75 \text{ dibulatkan menjadi } 400 \text{ responden.} \end{aligned}$$



Jumlah responden yang disurvei adalah 400. Mengingat Kota Denpasar terdiri atas empat kecamatan, maka survei dilakukan dengan menggunakan teknik sampel proporsional acak (*proportional random sampling*). Berdasarkan teknik ini, maka seluruh sampel dibagi empat secara merata sehingga setiap kecamatan disurvei 100 responden yang dipilih secara acak. Walaupun responden dipilih secara acak, namun setiap responden harus memenuhi kriteria utama bahwa responden adalah penduduk Kota Denpasar yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan teknik kuesioner. Apabila dilihat dari sumber datanya, maka penelitian ini menggunakan data primer. Menurut Sugiyono (2017:137), sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data, yakni responden. Data primer penelitian ini adalah jawaban kuesioner yang diberikan oleh responden. Lebih lanjut, Sugiyono (2017) menyatakan bahwa kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan sederet pertanyaan terstruktur atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

Secara metodologis, tipe pertanyaan di dalam angket dibagi menjadi dua, yaitu pertanyaan terbuka dan tertutup. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang mengharuskan responden untuk menuliskan jawaban dalam bentuk uraian deskriptif. Sementara itu, pertanyaan tertutup adalah jenis pertanyaan yang mengharuskan jawaban singkat dengan memberikan kesempatan kepada responden untuk memilih salah satu alternatif jawaban yang telah disediakan. Jawaban tersebut menghasilkan bentuk data nominal, ordinal, interval, dan ratio. Dalam penelitian ini, jenis kuesioner yang diajukan adalah kuesioner tertutup karena setiap responden tinggal memberikan tanda (✓) pada salah satu jawaban yang dipilih dari daftar pernyataan yang telah disusun secara tertulis.

### 3.4 Teknik Analisis Data

Penelitian kuantitatif dengan metode survei menjadikan kuesioner sebagai instrumen penelitian utama (Sugiyono, 2012). Alat untuk mengukur instrumen kuesioner dalam penelitian ini adalah skala interval berdasarkan *Skala Likert*. Pertanyaan dalam kuesioner disusun sedemikian rupa dalam bentuk “Pernyataan Positif” dengan 5 (lima) opsi jawaban. Artinya, responden diminta memberi persepsi positif terhadap setiap pertanyaan atau pernyataan tersebut. Setiap jawaban responden diberikan skor sebagai berikut.

1. Sangat Setuju (SS): 5.
2. Setuju: 4.
3. Ragu-ragu (R): 3.
4. Tidak Setuju (TS): 2.
5. Sangat Tidak Setuju (STS): 1.

Skor jawaban dari seluruh responden, dianalisis secara deskriptif-kuantitatif, yakni mendeskripsikan setiap variabel penelitian untuk mengetahui gambaran umum dari persepsi responden. Nilai rata-rata (*mean*) dilakukan untuk mencermati sebaran persepsi responden atas pernyataan-pernyataan yang diajukan dalam kuesioner. Nilai rata-rata diperoleh dari jawaban responden dengan skor masing-masing jawaban dengan rumus: **T x Pn** (T = jumlah pemilih jawaban, Pn = pilihan angka skor Likert). Seluruh skor jawaban dijumlahkan sehingga diperoleh **total skor**.

Interpretasi data dilaksanakan dengan menghitung skor jawaban dengan rumus berikut.

$I = \frac{TS}{X} \times 100 \%$	<p>I : Interpretasi TS : Total Skor X : Skor tertinggi</p>
----------------------------------	--------------------------------------------------------------------

$$\begin{aligned} \text{Skor tertinggi} &= \text{skor tertinggi Likert} \times \text{jumlah responden} \\ &= 5 \times 400 \\ &= 2000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Skor terendah} &= \text{skor terendah Likert} \times \text{jumlah responden} \\ &= 1 \times 400 \\ &= 400 \end{aligned}$$

Dengan menggunakan rumus tersebut, ketiga variabel (*parhyangan*, *pawongan*, *palemahan*) diukur secara terpisah menurut indikator dan subindikator yang ditetapkan. Setelah indeks setiap indikator diperoleh, langkah selanjutnya adalah mengukur indeks *Parhyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* dengan mengakumulasikan hasil seluruh indikator. Indeks *Tri Hita Karana* merupakan indeks komposit atau gabungan dari indeks ketiga variabel dengan rumus sebagai berikut.

$I_{thk} = \frac{I_{par} + I_{paw} + I_{pal}}{3}$	<p><math>I_{thk}</math> : Indeks <i>Tri Hita Karana</i>  <math>I_{par}</math> : Indeks <i>Parhyangan</i>  <math>I_{paw}</math> : Indeks <i>Pawongan</i>  <math>I_{pal}</math> : Indeks <i>Palemahan</i></p>
---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Teknik Penyajian Hasil Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang telah dianalisis disajikan secara naratif dan formal. Sajian data naratif digunakan untuk menyajikan data berupa narasi, uraian, dan padangan yang bersifat deskriptif. Sementara itu, sajian data secara formal dalam bentuk diagram yang diharapkan akan mempermudah penelitian dalam menganalisis dan memahami data secara sistematis. Indeks disusun dengan menggabungkan indeks dari ketiga variabel *Tri Hita Karana*.

## BAB IV

# PROFIL KOTA DENPASAR

---

### 3.1 Sejarah Kota Denpasar

**S**ejarah Kota Denpasar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah Kerajaan Badung, abad ke-16 M. Namun demikian, para ahli sejarah umumnya mengawali penelusuran sejarah Kota Denpasar dari masuknya pengaruh bangsa Eropa ke Kerajaan Badung pada sekitaran abad ke-19 M. Sebagaimana diketahui bahwa sejak abad ke-19, wilayah Kerajaan Badung sudah ramai dikunjungi para pedagang dari berbagai wilayah, termasuk masyarakat Eropa dan menjadi salah satu pusat perdagangan penting di Bali (Eck, 1880:214).

Kondisi ini menggugah niat pemerintah Hindia-Belanda untuk menguasai wilayah Kerajaan Badung, sejalan dengan program *Pax Nederlandica* yang dicanangkan oleh Kerajaan Belanda. *Pax Nederlandica* adalah pembentukan kawasan Hindia-Belanda sebagai kepanjangan wilayah dan demografi Kerajaan Belanda. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka pemerintah Hindia-Belanda yang berkedudukan di Singaraja mulai melakukan invasi ke wilayah selatan, baik melalui jalan damai (membangun koloni) maupun lewat intervensi militer (Wirawan dkk., 2009:32).

Pada 27 Mei 1904, perahu tongkang 'Sri Komala' milik saudagar China yang bernama Kwee Tek Tjiang terdampar di Pantai Sanur. Menurut aturan *Tawan Karang* yang diterapkan oleh pemerintah Hindia-Belanda, setiap kapal dagang yang terdampar wajib diselamatkan, baik penumpangnya maupun isinya. Penduduk Sanur menyatakan telah mematuhi hukum tersebut, tetapi ombak yang telampau besar mengakibatkan kapal itu rusak berat. Kwee Tek Tjiang melaporkan masalah ini pada Residen Hindia-Belanda di Singaraja dengan alasan

telah menderita kerugian hingga 3.000 ringgit. Laporan ini pun menyebabkan sengketa yang berlarut-larut antara penduduk Sanur dan pemerintah Hindia-Belanda.

Peristiwa ini tampaknya memang sengaja diperuncing, sebagai bagian skenario Belanda di bawah pemerintahan J.B. van Heutz untuk menjalankan invasinya ke Kerajaan Badung. Di lain pihak, Raja Badung yang ingin membela kepentingan masyarakat Sanur, bersikukuh menolak segala tuntutan yang diajukan Belanda karena meyakini bahwa masyarakat Sanur tidak pernah melanggar kontrak yang pernah diperjanjikan sebelumnya dengan pihak Belanda, terutama mengenai hak *Tawan Karang (klipt-recht)* (Wirawan dkk., 2009:33). Berbagai upaya tawar-menawar politik dan diplomasi gagal dilakukan. Pemerintah Belanda tampaknya memang sengaja mengulur-ulur penyelesaian persoalan kapal Sri Komala sebagai alasan untuk mengeksploitasi dan meligitimasi rencana pendudukan Kerajaan Badung.

Untuk mempertahankan kedaulatan Kerajaan Badung dari intervensi, intimidasi, dan ancaman pemerintah Hindia-Belanda, Raja Badung menyatakan siap melakukan perang secara terbuka (Wirawan dkk., 2009:34). Pada 15 September 1906, pasukan Belanda mendarat di Pantai Sanur di bawah pimpinan Mayor Jenderal Rost van Tonningen. Pada tanggal 16 September 1906, pasukan Belanda mulai menembakkan meriam ke Puri Denpasar dan Puri Pemecutan. Serangan ini mendapatkan perlawanan dari rakyat Badung dengan senjata tradisional, seperti tombak dan keris.

Tanggal 19 September 1906, pasukan Belanda mulai bergerak menuju Puri Denpasar dan Puri Pemecutan melalui Kesiman serta Sumerta. Pasukan Badung yang bersiaga di tepi Tukad Ayung menghadang dengan senjata seadanya, tetapi semangat mereka luar biasa. Hal ini diakui penulis Belanda bernama Dr. H.M. van Weede yang mengikuti gerak pasukan Belanda dalam pertempuran tersebut. Sekitar pukul 14.30 Wita, pasukan Belanda sudah berhasil menduduki Puri Kesiman. Kemudian, pasukan mereka mulai bergerak menuju Puri Denpasar dan Puri Pemecutan.



Puncak pertempuran terjadi pada 20 September 1906, sekitar pukul 07.00 WITA. Perlawanan masyarakat Badung terhadap penjajah Belanda dipimpin langsung I Gusti Ngurah Made Agung [Raja Denpasar VI] dari Puri Denpasar sehingga terjadilah perang habis-habisan (*puputan*) di pusat kerajaan Badung. Dalam perang *Puputan Badung* ini, Raja Denpasar VI akhirnya menemui *pralaya* (wafat). Kepahlawanan beliau ini diabadikan dengan gelar *Ida Cokorda Mantuk Ring Rana*, yakni 'raja yang gugur di medan pertempuran' (Wirawan dkk., 2009:34).

Setelah mengalahkan Raja Denpasar VI dalam *Puputan Badung*, pasukan Belanda melanjutkan penyerangan ke Puri Pemecutan. Raja Pemecutan IX melakukan perlawanan dari atas tandu, hingga akhirnya beliau juga mengalami *pralaya* dalam perang tersebut. Kekalahan Kerajaan Badung dalam perang ini melengkapi rencana Belanda untuk menguasai dua pilar utama Bali, yakni Buleleng di Bali Utara, serta Badung di Bali Selatan sehingga secara simbolis mengisyaratkan bahwa Belanda sudah benar-benar menguasai Bali.

Secara bertahap, pemerintah Hindia-Belanda pun mulai memindahkan pusat pemerintahan dari Singaraja [Buleleng] ke Badung [Denpasar] (Tim Penyusun, 2008:4). Denpasar pun dijadikan kota *onderafdeling* Bali Selatan sebagai salah satu distrik di bawah kendali langsung dari pemerintah Hindia-Belanda. Distrik Denpasar mewilayahi sejumlah desa adat, di antaranya Desa Adat Yangbatu, Padangsambian, Denpasar, dan Kerobokan; serta membawahi beberapa *prebekel* (desa dinas), seperti Dangin Puri, Dauh Puri, Pemecutan, Kampung Jawa, dan Padangsambian (Boon, 1938:44).

Peristiwa ini dipandang sebagai titik awal modernisasi birokrasi di Kota Denpasar karena Distrik Denpasar adalah struktur pemerintahan di bawah pemerintah Hindia-Belanda. Dengan kata lain, telah terjadi perubahan dari sistem birokrasi tradisional (Kerajaan Badung) ke sistem birokrasi modern (pemerintahan kolonial Hindia-Belanda). Melalui *Staatsblaad* No. 226, *Gouverneur van Nederland India*, 1 Juli 1929, I Gusti Alit Ngurah ditetapkan sebagai *Best Uurder* wilayah Badung.

Berdasarkan *Zeltbestuur Regeling Tahun 1938*, Badung ditingkatkan menjadi *landschaap*, yakni wilayah yang mandiri dan otonom dengan kepala pemerintahan disebut *regent*. Hal ini ditindaklanjuti dengan terbitnya *Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia No. 21, 7 Juli 1938*, bahwa pemerintah Hindia Belanda menobatkan delapan *regent* seluruh Bali. I Gusti Alit Ngurah pun dinobatkan sebagai *Regent* Badung dengan gelar 'Tjokorda Alit Ngurah' dari tahun 1929 hingga 1947. Meskipun dikatakan bersifat otonom dan mandiri, setiap *regent* harus bertanggungjawab kepada pemerintah Hindia-Belanda, Jadi, ini tidak lebih dari sekadar bentuk hegemoni politik kolonial.

Memasuki masa kemerdekaan, Bali merupakan bagian dari Negara Indonesia Timur (NIT) yang wilayahnya meliputi 8 [delapan] daerah swapraja (*astanegara*), termasuk Badung. Tjokorda Alit Ngurah digantikan oleh Tjokorda Ngurah Gede Pemetjutan yang memimpin tahun 1947 hingga 1959. Tahun 1958, Provinsi Sunda Kecil yang beribu kota di Singaraja pun dimekarkan menjadi tiga provinsi, yakni Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Untuk mengimbangi perkembangan yang terjadi, DPRD Tingkat I Bali pun mengajukan resolusi kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonom Daerah untuk memindahkan ibu kota Provinsi Bali. Resolusi tersebut disambut oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah yang kemudian memindahkan ibu kota Provinsi Bali dari Kota Singaraja ke Kota Denpasar sejak 23 Juni 1960 (Setiada, 2009:68). Sejak saat itu, Kota Denpasar menjadi ibu kota Pemerintah Daerah Tingkat I Bali, dan sekaligus ibu kota Pemerintah Daerah Tingkat II Badung (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 122, Tahun 1958).

Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dipimpin I Gusti Ngurah Anom Patjung selama satu periode (1959—1964). Selanjutnya, Bupati dijabat I Wayan Dana yang memerintah selama dua periode (1965—1975). Pada pertengahan tahun 1970-an, pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung mengusulkan pengembangan Denpasar menjadi daerah Kota Administratif. Bersamaan dengan itu, diusulkan pemekaran wilayah Kecamatan Denpasar dan Kesiman. Pemekaran ini

disetujui sehingga Kabupaten Daerah Tingkat II Badung yang awalnya hanya mewilayahi enam kecamatan, yaitu Petang, Abiansemal, Kuta, Mengwi, Denpasar, dan Kesiman; berubah menjadi tujuh kecamatan, yakni Petang, Kuta, Abiansemal, Mengwi, Denpasar Timur, Denpasar Selatan, dan Denpasar Barat.

Bupati Badung berikutnya adalah I Dewa Gde Oka yang memimpin dua periode (1975 – 1985). Pada masa ini, terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1978, tertanggal 27 Agustus 1978, yang isinya menetapkan Denpasar menjadi Kota Administratif dengan tiga kecamatan, yaitu Denpasar Barat, Denpasar Timur, dan Denpasar Selatan. Ditunjuk menjadi Walikota Administratif Denpasar pertama adalah I Gusti Ngurah Wardhana (1978-1983). Pada tahun 1980, Pemerintah Daerah Tingkat II Badung pun merintis usulan pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar. Upaya ini berhasil dengan lahirnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 135/2918/PUOD, tanggal 14 Agustus 1982, perihal Rencana Peningkatan Status Beberapa Kota Administratif di Wilayah Indonesia (Denpasar, Mataram, Kupang, Jayapura, Palu, dan Kendari) menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II.

Selanjutnya, Bupati Badung dijabat oleh Pande Made Latra selama satu periode (1985–1990), sedangkan Walikota Administratif Denpasar dijabat oleh I Gusti Putu Rai Andayana (1983—1987), dan dilanjutkan oleh Anak Agung Ngurah Gde Agung (1987—1991). Pada tahun 1992, terbitlah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992, 15 Januari 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar. Berdasarkan undang-undang tersebut, Kotamadya Denpasar diresmikan Menteri Dalam Negeri pada 27 Februari 1992. Momentum ini adalah babak baru penyelenggaraan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar yang berdiri sendiri dengan kepala pemerintahan disebut Walikota, sekaligus memiliki kedudukan yang sama dengan Bupati. Walikota Denpasar pertama dijabat oleh I Made Suwendha selama satu periode (1992-1997), kemudian dilanjutkan oleh

Komang Arsana (1997—1999). Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Kotamadya Denpasar secara resmi berubah menjadi daerah otonomi penuh yang kemudian disebut Pemerintah Kota Denpasar.

Kota Denpasar semula meliputi tiga wilayah kecamatan, mencakup Denpasar Barat, Denpasar Timur, dan Denpasar Selatan. Walikota Denpasar pertama dijabat oleh Anak Agung Ngurah Puspayoga selama satu periode (1999—2004) dan terpilih kembali melalui pemilihan walikota secara langsung periode 2005—2010. Pada masa inilah terjadi pemekaran satu wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Denpasar Utara, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004. Dengan demikian, wilayah Kota Denpasar terdiri atas empat wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Selatan, Denpasar Barat, dan Denpasar Utara. Sejarah pemerintah Kota Denpasar prakemerdekaan RI dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel 4.1

Status Pemerintahan dan Kepala Daerah Kota Denpasar

Periode	Status Pemerintahan	Nama Kepala Daerah
1928 – 1947	<i>Landschaap</i> Badung	Tjokorda Alit Ngurah
1948 – 1959	Daerah Swapraja Badung	Tjokorda Ngurah Gde Pemetjutan
1959 – 1964	Kabupaten Dati II Badung	I Gusti Ngurah Anom Patjung
1965 – 1975	Kabupaten Dati II Badung	I Wayan Dhana
1975 – 1985	Kabupaten Dati II Badung	I Dewa Gde Oka
1978 – 1983	Kota Administratif Denpasar	I Gusti Ngurah Wardhana
1985 – 1990	Kabupaten Dati II Badung	Pande Made Latra
1983 – 1987	Kota Administratif Denpasar	I Gusti Putu Rai Andayana
1990 – 1995	Kabupaten Dati II Badung	I Gusti Bagus Alit Putra
1987 – 1991	Kota Administratif Denpasar	A.A. Ngurah Gde Agung
1992 – 1997	Kota Madya Denpasar	I Made Suwendha
1997 – 1999	Kota Madya Denpasar	Komang Arsana
1999 – 2008	Kota Denpasar	A.A.G. Ngurah Puspayoga
2008 – 2018	Kota Denpasar	I.B. Rai Dharmawijaya Mantra
2019 - 2024	Kota Denpasar	I Gusti Ngurah Jayanegara



Perjalanan sejarah Kota Denpasar menunjukkan telah terjadi perubahan sistem birokrasi tradisional (kerajaan) ke birokrasi modern. Menurut Calinescu (dalam Haryono, 2005), perubahan tersebut menandai berlangsungnya modernisasi melalui rasionalisasi birokrasi. Artinya, birokrasi dijalankan berdasarkan sistem hukum dan politik yang rasional dengan memangkas atribut-atribut sosiokultural dalam sistem politik tradisional. Melalui kinerja birokrasi rasional ini, modernisasi di Kota Denpasar mengalami perkembangan yang signifikan, dan seiring dengan program pembangunan dari tingkat pusat sampai ke daerah, maka terjadilah perubahan secara terarah dan terencana.

Pembangunan yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis oleh pemerintah, mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, memposisikan masyarakat ke dalam kerangka masyarakat industri- kapitalis (Abdullah, 2006:16). Pembangunan yang disemangati oleh kapitalisme progresif mendorong terjadinya perubahan secara massif dari tatanan masyarakat tradisional ke tatanan modern (Haryono, 2005). Pembangunan di Kota Denpasar pun mulai berorientasi pada pembangunan fisik dan sumber daya manusia.

Hal ini mendorong pertumbuhan Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan, perekonomian, dan urbanisasi utama di Provinsi Bali. Setiap sudut Kota Denpasar tumbuh menjadi etalase-etalase kapitalis, seperti pertokoan, hotel, dan tempat usaha lainnya. Komplek-komplek perumahan kian menjamur untuk memwadahikan kepentingan masyarakat urban. Proses ini berkelindan dengan efek berantai (*multiplier effect*) pariwisata karena sejumlah kawasan wisata di Kota Denpasar, terutama Sanur, juga berkembang demikian pesat.

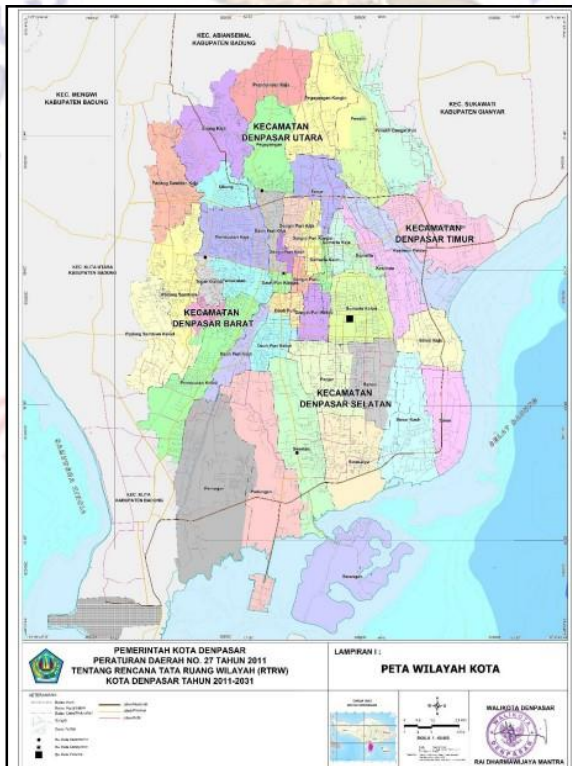
#### **4.2 Kondisi Geografis dan Pemanfaatan Lahan**

Secara geografis, wilayah Kota Denpasar terletak pada koordinat 08° 35' 31" – 08° 44' 49" LS dan 115° 10' 23" – 115° 16' 27" BT. Kota Denpasar berada pada ketinggian 00 – 75 meter dpl, dengan rentang suhu minimal 20,6° C terjadi pada



bulan Juli 2023, dan suhu maksimal 35,2°C terjadi pada bulan Maret dan Oktober 2023. Kelembaban udara minimum 43% terjadi pada bulan Oktober 2023, sedangkan maksimum 100% terjadi pada bulan Januari dan Juni 2023 (*Kota Denpasar dalam Angka, 2024:10*).

Kota Denpasar merupakan dataran rendah yang tidak mempunyai pegunungan atau perbukitan. Kota Denpasar beriklim tropis dengan pergantian dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari mencapai 423,5 mm/tahun, sedangkan curah hujan terendah pada bulan September, yakni 1,7 mm/tahun (*Kota Denpasar dalam Angka 2024:12*). Peta Kota Denpasar dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.1  
Peta Administratif Kota Denpasar  
(Lampiran RTRW Kota Denpasar 2011—2031)

Kota Denpasar berbatasan dengan Kabupaten Badung di bagian utara, barat, dan selatan; serta Kabupaten Gianyar dan Selat Badung di bagian timur dan selatan. Kota Denpasar sebagai ibukota Provinsi Bali memiliki posisi strategis, baik secara ekonomi maupun kepariwisataan sehingga menjadi titik sentral berbagai aktivitas, sekaligus menjadi penghubung dengan kabupaten lain. Infrastruktur transportasi juga sangat memadai sehingga lokasi Kota Denpasar dapat diakses lewat jalur darat, laut, ataupun udara. Jalur laut dapat ditempuh dari pelabuhan Benoa di Denpasar Selatan yang menghubungkan antarpulau di Indonesia. Jalur udara dapat ditempuh melalui akses Bandara Udara Internasional Ngurah Rai di Kabupaten Badung. Jalur darat dapat ditempuh melalui beberapa akses, seperti jalan Denpasar-Gilimanuk, *By Pass* Ngurah Rai, dan *By Pass* Prof. Ida Bagus Mantra. Melalui perangkat teknologi pemindai lokasi terkini, misalnya layanan *google map*, lokasi Kota Denpasar, cukup mudah untuk diakses.

Luas seluruh wilayah Kota Denpasar adalah 125,97 km<sup>2</sup> atau 12.597 ha setelah mendapat tambahan reklamasi Pantai Serangan seluas 380 ha. Luas wilayah ini setara dengan 2, 18% dari seluruh luas Pulau Bali. Secara administratif, Kota Denpasar dibagi menjadi empat kecamatan yang luas wilayah masing-masing adalah sebagai berikut:

- (a) Kecamatan Denpasar Timur: 25,94 km<sup>2</sup>;
- (b) Kecamatan Denpasar Selatan: 49,89 km<sup>2</sup>;
- (c) Kecamatan Denpasar Barat: 23,46 km<sup>2</sup>; dan
- (d) Kecamatan Denpasar Utara: 26,69 km<sup>2</sup>

*(Kota Denpasar dalam Angka 2024:19).*

Dari seluruh luas lahan tersebut, 2.409 ha merupakan lahan sawah; 510 ha lahan pertanian bukan sawah; dan 9.859 ha lainnya adalah lahan bukan pertanian. Pemanfaatan lahan terbesar adalah untuk permukiman penduduk, yakni 7.741,5 ha, disusul perdagangan (jasa) seluas 2.122,1 ha, serta lahan sawah seluas 1.514,8 ha. Profil pemanfaatan lahan di Kota Denpasar menurut hasil digitalisasi satelit tahun 2020 dapat disimak dalam tabel 4.2, di bawah ini.

**Tabel 4.2**  
**Pemanfaatan Lahan di Kota Denpasar Tahun 2020**

KECAMATAN	PENGUNAAN LAHAN (Ha)							TOTAL
	Badan Air	Perdagangan (Jasa)	Pemukiman	RTH	Sawah (Lahan Basah)	Tegalan (Lahan Kering)	Lain-nya	
Denpasar Timur	7,20.	286,23	1.604,05	51,6	574,92	65,43	3,60	<b>2.593</b>
Denpasar Selatan	22,13	708,55	3.001,46	800,87	324,69	0	131,30	<b>4.989</b>
Denpasar Barat	9,63	589,44	1.580,10	28,38	134,43	0	4,02	<b>2.346</b>
Denpasar Utara	7,75	537,92	1.555,92	20,61	480,79	2,05	63,96	<b>2.669</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>46.7</b>	<b>2.122,1</b>	<b>7.741,5</b>	<b>901,5</b>	<b>1.514,8</b>	<b>67,5</b>	<b>202.9</b>	<b>12.597</b>

Sumber: *Hasil Digitasi Interpretasi Citra Satelit Tahun 2020 dan observasi* (Kumara, dkk, 2023:246).

Dari tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Kota Denpasar tidak lagi memperlihatkan kehidupan agraris yang kuat yang ditandai dengan sempitnya lahan pertanian. Luas lahan pertanian berupa sawah (lahan basah) maupun tegalan hanya 1.582,31 ha (12,56%), sedangkan lahan bukan pertanian luasnya mencapai 11.014,69 ha (87,44%). Lahan pertanian ini pun terancam akan mengalami penyusutan terus menerus seiring dengan semakin massifnya gejala alih fungsi lahan di Kota Denpasar. Arus investasi pada bidang properti, terutama pembangunan kompleks-komplek perumahan baru, nyaris tidak pernah surut dalam rangka memenuhi kebutuhan permukiman masyarakat urban. Luas lahan yang dijadikan permukiman penduduk, bahkan sudah mencapai 61,46% dari seluruh lahan di Kota Denpasar.

Melemahnya kultur agraris masyarakat Kota Denpasar mengisyaratkan kuatnya pengaruh modernisasi yang secara simultan menggerakkan transformasi masyarakat tradisional ke modern. Perubahan pola pikir, cara pandang, sikap, dan perilaku masyarakat Kota Denpasar pun tidak terhindarkan, seiring dengan kuatnya penetrasi budaya modern. Masuknya gagasan materialisme, pragmatisme dan hedonisme, sejalan

dengan perkembangan budaya modern, tentu saja berpotensi mendegradasi kualitas hubungan masyarakat Kota Denpasar dengan Tuhan, sesama, dan alam-lingkungannya. Potensi ini patut diantisipasi oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga adat di Kota Denpasar.

4.3 Kependudukan

Berdasarkan data kependudukan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Denpasar (2024), tercatat bahwa penduduk Kota Denpasar tahun 2023 berjumlah 660.984 jiwa, dengan rincian 333.929 (50,52 %) berjenis kelamin laki-laki, dan 327.055 (49,48%) berjenis kelamin perempuan. Wilayah kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Denpasar Selatan, yaitu 188.998 jiwa (28,59%), disusul Denpasar Timur 182.422 (27,60%), Denpasar Utara 168.738 jiwa (25,53%), dan Denpasar Barat 120.826 jiwa (18,28%) (*Kota Denpasar dalam Angka 2024:37-38*).

Komposisi penduduk per kecamatan, laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, dan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) penduduk Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.3  
Komposisi Penduduk per Kecamatan, Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah (jiwa)	Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Tingkat Kepadatan Penduduk (per km <sup>2</sup> )	Sex Ratio
Denpasar Timur	182.422	0,02	7.035	98,53
Denpasar Selatan	188.998	0	3.788	99,63
Denpasar Barat	120.826	0.01	5.150	99,74
Denpasar Utara	168.738	0,02	6.322	100,24
Jumlah	660.984			
Rata-rata		0.02	5.247	99,50

Sumber: diolah dari data *Kota Denpasar dalam Angka 2024* (BPS Kota Denpasar, 2024:38-40).

Dari tabel 4.3 di atas dapat dimengerti bahwa jumlah penduduk terbanyak di Kota Denpasar berada di Kecamatan Denpasar Selatan, sedangkan yang tersedikit di Kecamatan Denpasar Barat. Rata-rata laju pertumbuhan per tahun 2023 adalah 0.02%. Penduduk terpadat di Kecamatan Denpasar, sedangkan terjarang di Kecamatan Denpasar Barat, dengan rata-rata tingkat kepadatan penduduk 5.247 per km<sup>2</sup>. Artinya, dalam setiap kilometer persegi wilayah Kota Denpasar dihuni rata-rata 5.247 penduduk, yang menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduk di Kota Denpasar cukup tinggi. Adapun rata-rata *sex ratio* penduduk Kota Denpasar adalah 99,50 yang bermakna bahwa perbedaan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan tidak signifikan.

Berikutnya, komposisi penduduk Kota Denpasar dapat dilihat menurut usia sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.4  
Jumlah Penduduk Kota Denpasar Menurut Usia Tahun 2023

Kelompok Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase (%)
	L	P		
0—4	28.117	27.539	55.636	8,42
5—9	26.414	25.870	52.284	7,91
10—14	25.178	24.660	49.838	7,54
15—19	27.282	26.720	54.002	8,17
20—24	35.497	34.766	70.263	10,63
25—29	35.664	34.929	70.593	10,68
30—34	31.189	30.547	61.736	9,34
35—39	28.551	27.963	56.514	8,55
40—44	27.583	27.015	54.598	8,26
45—49	22.507	22.044	44.551	6,74
50—54	16.897	16.549	33.446	5,06
55—59	11.754	11.512	23.266	3,52
60—64	7.245	7.097	14.342	2,17
65 ke atas	10.051	9.844	19.895	3,01
<b>Jumlah</b>	<b>333.929</b>	<b>327.055</b>	<b>660.984</b>	<b>100</b>

Sumber: Kota Denpasar dalam Angka 2024 (BPS Kota Denpasar, 2024:40).



Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa 8,42 % penduduk Kota Denpasar adalah balita dan anak-anak (5—14 tahun) 15,54 %, remaja (15—19 tahun) 8,17%, usia produktif (20—54 tahun) 59,26%, serta usia pensiun dan manula (55 ke atas) sebesar 8,61%. Sebaran data ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk dengan usia produktif di Kota Denpasar terbanyak jumlahnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa potensi sumber daya manusia (SDM) di Kota Denpasar cukup besar, dan potensi ini sepatutnya diberdayakan secara optimal guna mendukung program-program pembangunan.

Pembangunan sumber daya manusia berbasis *Tri Hita Karana* merupakan salah satu bagian dari misi pembangunan di Kota Denpasar. Misi ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari kondisi kependudukan sebagai modal sosial dan budaya yang harus diberdayakan secara optimal. Pembangunan berbasis *Tri Hita Karana* dalam konteks sumber daya manusia (SDM) tidak semata hanya menyorot aspek sosial kemasyarakatan (*pawongan*) karena SDM yang unggul juga harus mempunyai kecerdasan intelektual, emosional, moral, spiritual, dan sosial. Artinya, pembangunan SDM berbasis *Tri Hita Karana* harus menyentuh *parhyangan*, *pawongan*, dan *palemahan* secara holistik. Di ketiga ranah inilah, penting memahami parameter modernitas sebagai lingkungan eksternal yang diadaptasikan secara terus menerus oleh masyarakat Kota Denpasar.

#### 4.4 Tiga Parameter Modernitas

Menurut Triguna (1997:30-33), terdapat tiga parameter penting yang menentukan keberhasilan proses transformasi sosial masyarakat tradisional ke modern, meliputi pendidikan, ekonomi, dan komunikasi. Pendidikan berperan penting untuk mempercepat transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) sehingga masyarakat dapat memanfaatkan kemajuan Iptek dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain. Parameter ekonomi juga tidak kalah pentingnya dalam transformasi sosial karena tanpa modal ekonomi yang kuat, masyarakat akan mengalami kesulitan dalam kompetisi ekonomi global. Parameter ketiga

adalah komunikasi, yakni kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mengakses dunia global, sekaligus membangun komunikasi lintasbudaya. Gambaran mengenai ketiga parameter ini di Kota Denpasar dapat dilihat dari data yang tersaji dalam sejumlah sumber.

Pertama, pendidikan sebagai penggerak modernisasi di Kota Denpasar dapat dilihat dari angka melek huruf (AMH) dan tingkat pendidikan masyarakat. Berdasarkan data *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali 2024* diketahui bahwa angka melek huruf masyarakat Kota Denpasar adalah yang tertinggi di Provinsi Bali, yakni 98,73%. Data tersebut menunjukkan salah satu indikator keberhasilan pembangunan pendidikan di Kota Denpasar, baik dari segi kualitas maupun dukungan fasilitas, sarana, dan prasarana.

Kedua, parameter ekonomi masyarakat Kota Denpasar dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat. Berdasarkan data *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2024*, pendapatan per kapita masyarakat Kota Denpasar sebesar Rp. 51.576.090,- per tahun, sebagai tertinggi kedua di Provinsi Bali setelah Kabupaten Badung. Pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar masih belum pulih sepenuhnya akibat dampak pandemi *Covid-19*. Pada tahun 2023, Kota Denpasar mengalami inflasi setinggi 2,54%, tetapi angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2022 yang tingkat inflasinya mencapai 6,44%. Angka kemiskinan di Kota Denpasar tahun 2023 adalah 2,68%, atau turun sebesar 0,29% dibandingkan pada tahun 2022 (*Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Denpasar 2023*). Artinya, parameter ekonomi Kota Denpasar cukup menjanjikan sehingga potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terbuka lebar.

Ketiga, parameter komunikasi dapat dilihat berdasarkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (infokom), serta komunikasi lintas-budaya. Data *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2024* menunjukkan bahwa persentase pengguna telepon seluler di Kota Denpasar adalah 93%, dan tertinggi di Provinsi Bali. Demikian pula pengakses internet di Kota Denpasar juga tertinggi di Provinsi Bali, yakni mencapai

87,54%. Hampir seluruh rumah tangga di Kota Denpasar juga memiliki saluran televisi untuk mengakses berbagai informasi. Artinya, masyarakat Kota Denpasar sudah demikian akrab dengan teknologi informasi dan telekomunikasi.

Dari ketiga parameter tersebut dapat dikatakan bahwa Kota Denpasar menunjukkan karakter kota modern, bahkan kota metropolitan. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan akses pendidikan, ekonomi, dan komunikasi yang mampu dijangkau seluruh warga. Ketiga parameter tersebut menjadi kekuatan transformatif masyarakat Kota Denpasar dalam menghadapi berbagai perubahan zaman. Walaupun demikian, parameter-parameter tersebut juga menyajikan tantangan tersendiri bagi masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam menyikapi arus budaya modern dan global.

Manakala budaya modern telah mengintensifikasi kesadaran masyarakat, maka perubahan nilai, pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat tradisional menjadi keniscayaan kultural yang tidak terbantahkan. Demikian pula dengan pelaksanaan *Tri Hita Karana* dalam realitas praksis di masyarakat. *Tri Hita Karana* sebagai inti nilai dan basis kebudayaan Bali memiliki kekuatan transformatif untuk menggerakkan pembangunan di Kota Denpasar. Namun pada sisi yang lain, modernitas yang arusnya begitu kuat juga menawarkan berbagai tatanan nilai baru ke dalam masyarakat. Dalam konteks inilah, dialektika nilai *Tri Hita Karana* dan modernitas menjadi penentu tingkat keberhasilan pembangunan di Kota Denpasar.

Fakta menunjukkan bahwa masyarakat Kota Denpasar masih mempertahankan struktur dan kultur tradisional, seperti ditandai dengan keberadaan desa dan *banjar* adat, termasuk berbagai tradisi dan seni budaya keagamaan. Namun warga Kota Denpasar juga mengadaptasi struktur dan kultur modern seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan wilayahnya sebagai kota metropolitan. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa pergulatan antara nilai-nilai tradisional dan modern menjadi bagian tidak terpisahkan dalam dinamika sosiokultural warga Kota Denpasar.

Visi pembangunan Kota Denpasar yang menekankan kreativitas dan inovasi berbasis budaya demi terwujudnya kemajuan masyarakat, mengisyaratkan pentingnya harmoni antara nilai-nilai tradisional dan modern. Dalam konteks ini, *Tri Hita Karana* sebagai landasan pembangunan berwawasan budaya dapat dijadikan kendali kultural, sekaligus penggerak transformasi sosial. *Tri Hita Karana* sebagai kendali kultural bahwa nilai ini penting direvitalisasi dan direkontekstualisasi untuk membangun ketahanan budaya dan jati diri masyarakat di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi. Namun demikian, masyarakat juga harus menjadikan *Tri Hita Karana* sebagai spirit untuk mencapai kemajuan moral, spiritual, serta material secara seimbang dan harmonis, karena itulah makna kebahagiaan hidup yang sesungguhnya.



## BAB V

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Indeks *Tri Hita Karana* Kota Denpasar tahun 2024, diukur dan ditetapkan berdasarkan analisis jawaban responden atas sejumlah pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner. Responden yang mengisi kuesioner berjumlah 400 orang dan seluruhnya merupakan penduduk Kota Denpasar yang telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner bertujuan untuk menggali persepsi masyarakat Kota Denpasar terhadap kinerja pembangunan di bidang tata keagamaan (*parhyangan*), tata kemasyarakatan (*pawongan*), dan tata alam-lingkungan (*palemahan*) sebagai dasar untuk menyusun indeks *Tri Hita Karana*.

### 5.1 Profil Responden

Profil responden disusun berdasarkan komposisi usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan agama yang dianut. Profil usia dan jenis kelamin responden dapat disimak dalam tabel 5.1, berikut.

Tabel 5.1  
Profil Responden menurut Usia dan Jenis Kelamin

Rentang Usia	Jumlah		Persentase (%)
	Laki-laki	Perempuan	
18 – 25	60	100	40
26 – 35	80	32	28
36 – 45	12	36	12
46 – 55	12	24	9
56 – 65	16	24	10
60 ke atas	4	-	1
Jumlah	184	216	100



Berdasarkan tabel 5.1 di atas dapat diketahui bahwa responden berjenis kelamin laki-laki adalah 46 %, sedangkan perempuan adalah 54%. Usia responden yang terbesar pada rentang usia 18-25 tahun (40%), disusul 26-35 tahun (28%), 36-45 tahun (12%), 46-55 tahun (9%), 56-60 tahun (10%), dan 60 tahun ke atas (1%). Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden (89%) termasuk usia produktif (18-55 tahun) sehingga frekuensinya berhadapan langsung dengan kinerja pembangunan *Tri Hita Karana* di Kota Denpasar cukup tinggi. Artinya, jawaban yang disampaikan dapat merepresentasikan persepsi yang benar-benar diketahui, dirasakan, dan dialami dalam aktivitas praksis sehari-hari.

Profil responden selanjutnya diklasifikasikan menurut tingkat pendidikan, seperti pada tabel 5.2 berikut ini.

Tabel 5.2  
Profil Responden menurut Tingkat Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah		Persentase (%)
	Laki-laki	Perempuan	
Tamat SD	2	2	1
SMP	7	9	4
SMA	72	120	48
Diploma	28	12	10
Sarjana	65	67	33
Pascasarjana	10	6	4
<b>Jumlah</b>	<b>184</b>	<b>216</b>	<b>100</b>

Tabel 5.2 di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden terbesar adalah tamat SMA (48%), disusul sarjana (33%), diploma (10%), pascasarjana (4%), SMP (4%), serta SD (1%). Artinya, sebagian besar responden (85%) memiliki tingkat pendidikan menengah atas dan tinggi yang berpotensi memengaruhi persepsi mereka terhadap pembangunan *Tri Hita Karana* di Kota Denpasar. Tingkat pendidikan umumnya berkorelasi dengan sikap kritis dan rasional atas berbagai hal yang dipersepsikan, termasuk dalam menjawab pertanyaan kuesioner yang diajukan.

Selanjutnya, profil responden diklasifikasikan menurut jenis pekerjaan sebagaimana tersaji dalam tabel 5.3 berikut di bawah ini.

Tabel 5.3  
Profil Responden menurut Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah		Persentase (%)
	Laki-laki	Perempuan	
Pelajar/Mahasiswa	41	55	24
Petani	2	-	0,5
ASN/TNI/Polri/ BUMN/D	12	8	5
Karyawan Swasta	52	58	27,5
Wirausaha	45	35	20
Lainnya	32	60	23
<b>Jumlah</b>	<b>184</b>	<b>216</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 5.3 di atas dapat dimengerti bahwa jenis pekerjaan responden terbesar adalah karyawan swasta (27,5%), disusul pelajar/mahasiswa (24%), pekerjaan lainnya (23%), wirausaha (20%), ASN/TNI/Polri/BUMN/D (5%), dan petani (0,5%). Jenis pekerjaan lainnya mencakup tukang, buruh, dan ibu rumah tangga. Artinya, mayoritas responden dipandang memiliki persepsi langsung dengan pembangunan ekonomi di Kota Denpasar, terutama yang berkaitan dengan lapangan kerja, usaha, serta ekonomi kreatif.

Profil responden berikutnya diklasifikan menurut agama yang dianut, seperti pada tabel 5.4 berikut ini.

Tabel 5.4  
Profil Responden menurut Agama

Agama	Jumlah		Persentase (%)
	Laki-laki	Perempuan	
Hindu	107	161	67
Islam	48	32	20
Katolik	7	5	3
Kristen	18	18	9
Buddha	4	-	1
Konghucu	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>184</b>	<b>216</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 5.4 di atas dapat dimengerti bahwa jumlah responden terbanyak beragama Hindu (67%), disusul Islam (20%), Kristen (9%), Katolik (3%), Buddha (1%), dan tidak ada responden yang beragama Konghucu. Hal ini terkait erat dengan metode *random sampling* yang digunakan bahwa responden dipilih secara acak dan tidak distratifikasi menurut agama yang dianut. Walaupun demikian, tim survei lapangan sudah diberikan pembekalan untuk menemui responden dari berbagai agama sehingga diperoleh profil responden seperti di atas. Profil tersebut memang tidak merepresentasikan umat beragama di Kota Denpasar, namun setidaknya sudah mendekati presentase jumlah pemeluk masing-masing.

## 5.2 Indeks *Tri Hita Karana* di Kota Denpasar

Indeks *Tri Hita Karana* di Kota Denpasar diukur dengan mengakumulasi indeks dari ketiga variabel, yakni indeks *parhyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*. Pengukuran indeks ketiga variabel tersebut menggabungkan indeks pada masing-masing kecamatan dengan maksud agar dapat diidentifikasi kelemahan dan kekuatan sebagai bahan kajian untuk rencana aksi Pemerintah Kota Denpasar ke depan.

Indeks setiap variabel merupakan akumulasi dari indeks subindikator pada masing-masing kecamatan, dengan rumus interpretasi persen yang dijelaskan sebelumnya (*lihat* hal. 20). Hasil pengukuran tersebut diinterpretasi berdasarkan interval persen dengan rumus  $(\frac{\text{skor terendah}}{\text{skor tertinggi}} \times 100) \rightarrow (\frac{400}{2000} \times 100) = 20$ . Jadi rentang interval persen indeksnya adalah:

0% – 19,99%	: <b>Sangat Buruk</b>
20% – 39,99%	: <b>Rendah</b>
40% – 59,99%	: <b>Cukup</b>
60% – 79,99%	: <b>Baik</b>
80% – 100%	: <b>Sangat Baik</b>

### 5.2.1 Indeks *Parhyangan*

Terdapat lima indikator yang digunakan untuk mengukur indeks *parhyangan* di Kota Denpasar, yakni akses pendidikan agama dan keagamaan [ $I_1$ ], sikap keagamaan yang inklusif

dan toleran [I<sub>2</sub>], tri kerukunan umat beragama [I<sub>3</sub>], kebebasan dan kenyamanan beribadah [I<sub>4</sub>], serta peran lembaga sosial-keagamaan [I<sub>5</sub>]. Kelima indikator ini dapat merepresentasikan cita-cita ideal pembangunan pada bidang *parhyangan*, yakni terwujudnya masyarakat Kota Denpasar yang beriman dan bertaqwa (*sradha* dan *bhakti*) kepada Tuhan Yang Maha Esa, toleran, rukun, damai, dan sejahtera.

Capaian pembangunan di bidang *parhyangan* tersebut diukur dengan menilai persepsi masyarakat Kota Denpasar terhadap lima indikator yang disebutkan di atas (I<sub>1</sub> – I<sub>5</sub>) seperti tertuang dalam tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 5.5  
Akses Pendidikan Agama dan Keagamaan

Kecamatan	Subindikator				Indeks Kumulatif
	SI <sub>1</sub>	SI <sub>2</sub>	SI <sub>3</sub>	SI <sub>4</sub>	
Denpasar Timur	91,00	90,00	88,75	90,00	89,94
Denpasar Selatan	91,50	89,20	89,00	89,30	89,75
Denpasar Barat	91,60	89,55	89,05	89,75	89,98
Denpasar Utara	91,50	89,00	89,25	89,50	89,81
	91,4	89,44	89,01	89,64	89,87

Dari tabel 5.5 tersebut dapat dipahami bahwa indikator akses pendidikan agama dan keagamaan di Kota Denpasar berkatagori **Sangat Baik (89,87%)**. Subindikator pendidikan formal memiliki indeks tertinggi yang berarti bahwa mayoritas masyarakat Kota Denpasar sudah mendapatkan pendidikan agama di sekolah. Namun subindikator lain perlu ditingkatkan agar memberikan kontribusi yang seimbang terhadap indeks kumulatif. Berikutnya, indeks sikap keagamaan yang inklusif dan toleran dapat disimak pada tabel 5.6 di bawah ini.

Tabel 5.6  
Sikap Keagamaan yang Inklusif dan Toleran

Kecamatan	Subindikator				Indeks Kumulatif
	SI <sub>1</sub>	SI <sub>2</sub>	SI <sub>3</sub>	SI <sub>4</sub>	
Denpasar Timur	87,00	87,55	87,25	88,25	87,51
Denpasar Selatan	86,95	87,50	88,30	88,00	87,69
Denpasar Barat	87,50	87,45	87,65	88,10	87,68
Denpasar Utara	86,75	87,55	88,25	87,75	87,58
	87,05	87,51	88,86	88,03	87,62

Dari tabel 5.6 di atas dapat dipahami bahwa indikator sikap keagamaan yang inklusif dan toleran di Kota Denpasar berkategori **Sangat Baik (87,62%)**. Subindikator keterbukaan individu untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan umat beragama lain menduduki indeks tertinggi yang berarti bahwa masyarakat Kota Denpasar sudah mengembangkan nilai-nilai multikulturalisme dalam kehidupan beragama. Subindikator lain memberikan kontribusi yang relatif seimbang pada indeks kumulatif. Selanjutnya, indeks tri kerukunan umat beragama dapat disimak pada tabel 5.7 di bawah ini.

Tabel 5.7  
Tri Kerukunan Umat Beragama

Kecamatan	Subindikator				Indeks Kumulatif
	SI <sub>1</sub>	SI <sub>2</sub>	SI <sub>3</sub>	SI <sub>4</sub>	
Denpasar Timur	87,75	88,50	87,10	87,75	87,78
Denpasar Selatan	87,85	87,35	86,75	87,60	87,39
Denpasar Barat	88,70	87,75	87,50	88,00	87,99
Denpasar Utara	87,75	87,70	86,55	87,10	87,28
	88,01	87,83	86,98	87,61	<b>87,61</b>

Dari tabel 5.7 di atas dapat dipahami bahwa indikator tri kerukunan umat beragama di Kota Denpasar masuk kategori **Sangat Baik (87,61%)**. Semua subindikator juga memberikan kontribusi yang relatif seimbang terhadap indeks kumulatif sehingga menunjukkan bahwa hubungan intern, antarumat, dan antarumat beragama di Kota Denpasar sudah terbangun dengan baik. Peran pemerintah dalam mengatasi potensi-potensi konflik antarumat beragama juga mendapat apresiasi masyarakat sehingga menduduki indeks tertinggi. Berikutnya, indeks kebebasan dan kenyamanan beribadah dapat disimak pada tabel 5.8 di bawah ini.

Tabel 5.8  
Kebebasan dan Kenyamanan Beribadah

Kecamatan	Indikator				Indeks Kumulatif
	SI <sub>1</sub>	SI <sub>2</sub>	SI <sub>3</sub>	SI <sub>4</sub>	
Denpasar Timur	87,15	85,20	86,55	84,20	85,78
Denpasar Selatan	86,75	84,75	86,40	84,50	85,60
Denpasar Barat	86,60	85,80	86,30	84,20	85,73
Denpasar Utara	85,50	85,50	86,00	83,70	85,18
	86,50	85,31	86,31	84,15	<b>85,57</b>



Dari tabel 5.8 di atas dapat dipahami bahwa indikator kebebasan dan kenyamanan beribadah di Kota Denpasar dikatagorikan **Sangat Baik (85,57%)**. Dari empat subindikator tersebut, kenyamanan beridabah secara inividu memberikan kontribusi paling tinggi, sedangkan subindikator lainnya juga relatif berkontribusi seimbang terhadap indeks kumulatif. Jadi, kebebasan dan kenyamanan beribadah telah dirasakan oleh mayoritas masyarakat Kota Denpasar. Selanjutnya, indeks peran lembaga keagamaan di Kota Denpasar dapat diungkap pada tabel 5.9 di bawah ini.

Tabel 5.9  
Peran Lembaga Keagamaan

Kecamatan	Indikator				Indeks Kumulatif
	SI <sub>1</sub>	SI <sub>2</sub>	SI <sub>3</sub>	SI <sub>4</sub>	
Denpasar Timur	81,75	82,00	82,70	82,75	82,30
Denpasar Selatan	81,70	81,90	82,60	82,70	82,23
Denpasar Barat	81,60	81,90	80,80	82,90	81,80
Denpasar Utara	81,80	81,95	80,85	82,50	81,78
	81,71	81,94	81,74	82,71	<b>82,02</b>

Dari tabel 5.9 tersebut dapat dipahami bahwa indikator peran dan fungsi lembaga keagamaan di Kota Denpasar dikatagorikan **Sangat Baik (82,02%)**. Keempat subindikator memberikan kontribusi yang seimbang pada indeks kumulatif. Namun jika dibandingkan dengan indikator *parhyangan* yang lain, peran dan fungsi lembaga keagamaan ini tergolong yang paling rendah. Artinya, peran dan fungsi lembaga keagamaan ini harus terus ditingkatkan sehingga keberadannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kota Denpasar.

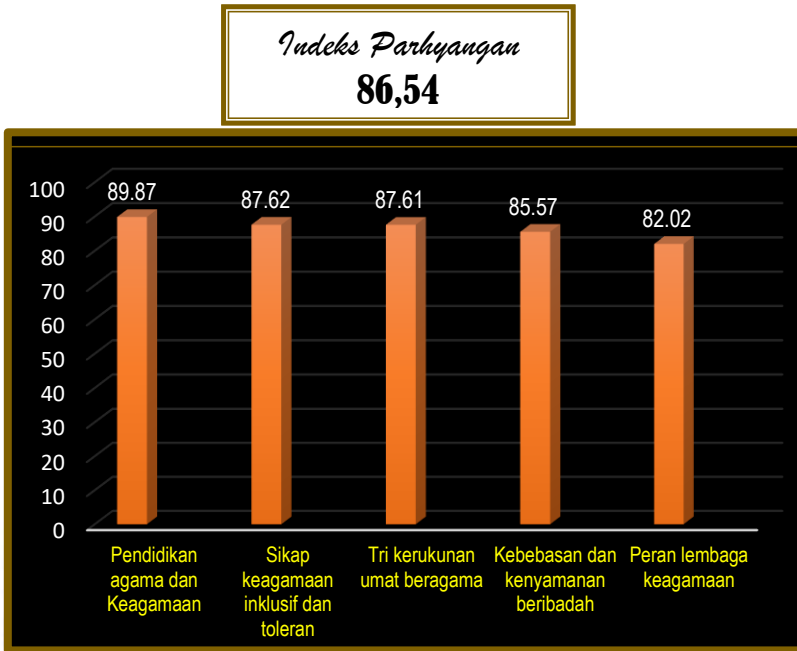
Berdasarkan kelima indikator tersebut, maka indeks *parhyangan* di Kota Denpasar dapat diukur dengan metode komposit, yaitu menggabungkan indeks dari kelima indikator di atas dan menentukan rata-rata, sebagai berikut.

$$\text{Indeks Parhyangan} = \frac{I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5}{5}$$

$$I\text{-par} = \frac{89,87 + 87,62 + 87,61 + 85,57 + 82,02}{5}$$

$$I\text{-par} = 86,54$$

Diagram 5.1  
Indeks *Parhyangan* di Kota Denpasar Tahun 2024



### 5.2.2 Indeks *Pawongan*

Terdapat lima indikator yang digunakan untuk mengukur indeks *pawongan* di Kota Denpasar, yakni pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi [I<sub>1</sub>], keterbukaan akses informasi publik [I<sub>2</sub>], kualitas pelayanan publik [I<sub>3</sub>], situasi dan kondisi kamtibmas [I<sub>4</sub>], dan kohesi sosial [I<sub>5</sub>]. Kelima indikator ini merepresentasikan cita-cita ideal pembangunan di bidang *pawongan*, yaitu terciptanya masyarakat Kota Denpasar yang kreatif, inovatif, maju, sehat, berbudaya, sejahtera, tenteram, dan damai melalui pelayanan publik yang berkualitas, merata, sekaligus berkeadilan, berlandaskan prinsip *sewakadharma* ('melayani adalah kewajiban').

Capaian pembangunan di bidang *pawongan* tersebut diukur berdasarkan persepsi masyarakat Kota Denpasar atas lima indikator yang disebutkan di atas (I<sub>1</sub> – I<sub>5</sub>), seperti tertuang dalam tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 5.10  
Pemerataan Akses Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi

Kecamatan	Indikator				Indeks Kumulatif
	SI <sub>1</sub>	SI <sub>2</sub>	SI <sub>3</sub>	SI <sub>4</sub>	
Denpasar Timur	81,75	81,90	81,80	82,45	81,98
Denpasar Selatan	81,80	79,70	81,65	82,40	81,39
Denpasar Barat	81,85	81,80	81,60	82,55	81,95
Denpasar Utara	82,00	81,80	81,75	82,50	82,01
	81,85	81,30	81,70	82,48	81,83

Dari tabel 5.10 tersebut dapat dipahami bahwa indikator pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Kota Denpasar berkategori **Sangat Baik (82,02%)**. Keempat subindikator memberikan kontribusi yang cenderung merata terhadap indeks kumulatif. Artinya, mayoritas masyarakat di Kota Denpasar sudah dapat mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi secara merata. Akan tetapi, sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru di sekolah dan layanan BPJS masih dikeluhkan oleh beberapa warga. Selanjutnya, indeks keterbukaan informasi publik dapat disimak pada tabel 5.11 di bawah ini.

Tabel 5.11  
Keterbukaan Akses Informasi Publik

Kecamatan	Indikator				Indeks Kumulatif
	SI <sub>1</sub>	SI <sub>2</sub>	SI <sub>3</sub>	SI <sub>4</sub>	
Denpasar Timur	82,60	82,20	82,10	82,65	82,39
Denpasar Selatan	82,65	82,25	82,15	82,60	82,41
Denpasar Barat	82,70	82,20	82,25	82,65	82,45
Denpasar Utara	82,00	82,80	82,75	82,50	82,51
	82,50	82,36	82,31	82,60	82,44

Dari tabel 5.11 tersebut dapat dipahami bahwa indikator keterbukaan akses informasi publik di Kota Denpasar masuk kategori **Sangat Baik (82,44%)**. Keempat subindikator juga memberikan kontribusi yang cenderung merata pada indeks kumulatif. Artinya, mayoritas masyarakat Kota Denpasar bisa mengakses informasi publik yang disediakan oleh pemerintah melalui berbagai saluran. Keterbukaan akses informasi publik menjadi bagian integral dari transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Selanjutnya, indeks kualitas pelayanan publik di Kota Denpasar dapat disimak pada tabel 5.12 di bawah ini.

Tabel 5.12  
Kualitas Pelayanan Publik

Kecamatan	Indikator				Indeks Kumulatif
	SI <sub>1</sub>	SI <sub>2</sub>	SI <sub>3</sub>	SI <sub>4</sub>	
Denpasar Timur	83,75	83,25	83,50	82,75	82,39
Denpasar Selatan	83,60	83,60	83,60	82,80	83,35
Denpasar Barat	83,75	83,60	83,55	83,00	83,48
Denpasar Utara	83,85	83,65	83,50	83,25	83,56
	83,74	83,53	83,54	82,95	<b>83,20</b>

Dari tabel 5.12 tersebut dapat dipahami bahwa indikator kualitas pelayanan publik di Kota Denpasar masuk katagori **Sangat Baik (83,20%)**. Keempat subindikator memberikan kontribusi yang relatif merata pada indeks kumulatif. Artinya, sebagian besar masyarakat Kota Denpasar telah merasakan kualitas pelayanan publik yang disediakan pemerintah. Motto *Sewakadharma* yang merupakan spirit pelayanan publik Kota Denpasar boleh jadi turut memengaruhi peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut. Selanjutnya, indeks situasi dan kondisi kamtibmas di Kota Denpasar dipaparkan pada tabel 5.13 di bawah ini.

Tabel 5.13  
Situasi dan Kondisi Kamtibmas

Kecamatan	Indikator				Indeks Kumulatif
	SI <sub>1</sub>	SI <sub>2</sub>	SI <sub>3</sub>	SI <sub>4</sub>	
Denpasar Timur	82,15	82,05	81,50	81,30	81,75
Denpasar Selatan	81,50	81,75	81,35	81,20	81,45
Denpasar Barat	81,40	81,65	81,30	81,50	81,46
Denpasar Utara	81,55	81,75	81,65	81,60	81,64
	81,65	81,80	81,45	81,40	<b>81,58</b>

Dari tabel 5.13 tersebut dapat dipahami bahwa indikator situasi dan kondisi di Kota Denpasar berkatagori **Sangat Baik (81,58%)**. Keempat subindikator memberikan kontribusi yang relatif merata pada indeks kumulatif. Artinya, sebagian besar masyarakat Kota Denpasar merasakan bahwa situasi dan kondisi kamtibmas relatif masih terkendali. Namun demikian, indikator ini tampaknya paling lemah di antara indikator yang lain. Apalagi ada beberapa peristiwa gangguan kamtibmas yang menjadi sorotan publik di Kota Denpasar.

Berikutnya, indeks kohesi sosial di Kota Denpasar dapat disimak pada tabel 5.14 di bawah ini.

Tabel 5.14  
Kohesi Sosial

Kecamatan	Indikator				Indeks Kumulatif
	SI <sub>1</sub>	SI <sub>2</sub>	SI <sub>3</sub>	SI <sub>4</sub>	
Denpasar Timur	83,25	83,50	83,15	83,60	83,38
Denpasar Selatan	83,50	83,45	83,25	83,50	83,43
Denpasar Barat	83,40	83,50	83,35	83,40	83,41
Denpasar Utara	83,50	83,55	83,45	83,40	83,48
	83,41	83,50	83,30	83,48	<b>83,42</b>

Dari tabel 5.14 tersebut dapat dipahami bahwa indikator kohesi sosial di Kota Denpasar masuk katagori **Sangat Baik (83,42%)**. Keempat subindikator memberikan kontribusi yang relatif merata pada indeks kumulatif. Artinya, sebagian besar masyarakat Kota Denpasar merasakan bahwa interaksi sosial dan kerja sama antarwarga telah berjalan dengan baik tanpa adanya diskriminasi terhadap komunitas tertentu. Akan tetapi, beberapa gangguan kamtibmas yang melibatkan komunitas-komunitas tertentu berpotensi melemahkan kohesi sosial.

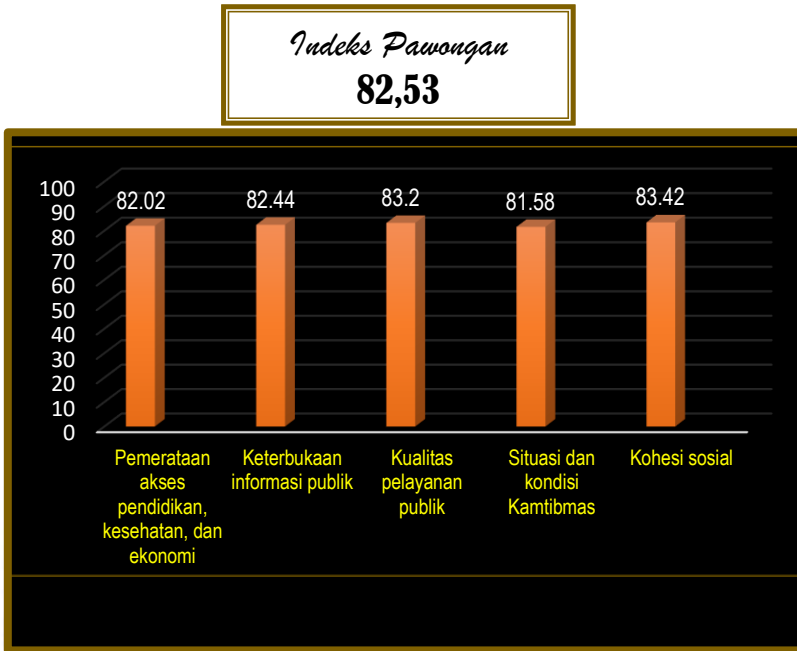
Berdasarkan hasil pengukuran terhadap lima indikator *pawongan* tersebut di atas, maka indeks *pawongan* di Kota Denpasar dapat disajikan, sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Indeks Pawongan} &= \frac{I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5}{5} \\ I\text{-paw} &= \frac{82,02 + 82,44 + 83,20 + 81,58 + 83,42}{5} \\ I\text{-paw} &= 82,53 \end{aligned}$$

Jadi, indeks *pawongan* di Kota Denpasar pada tahun 2024 adalah **82,53** yang masih katagori **Sangat Baik**. Namun demikian, jika dibandingkan dengan indeks *parhyangan* dapat dilihat bahwa terdapat interval cukup lebar ( $\pm 4\%$ ) yang berarti bahwa bidang ini masih perlu mendapatkan perhatian serius, terutama aspek kamtibmas yang indeksnya berada di tingkat paling bawah, dibandingkan indikator-indikator lainnya.



Diagram 5.2  
Indeks *Pawongan* di Kota Denpasar Tahun 2024



### 5.2.3 Indeks *Palemahan*

Terdapat lima indikator yang digunakan untuk mengukur indeks *palemahan* di Kota Denpasar, yakni kualitas lingkungan [I<sub>1</sub>], kinerja pengelolaan sampah [I<sub>2</sub>], kualitas infrastruktur dan fasilitas umum [I<sub>3</sub>], kualitas tata ruang dan wilayah [I<sub>4</sub>], serta kualitas ruang publik [I<sub>5</sub>]. Kelima indikator merepresentasikan cita-cita dan tujuan ideal pembangunan di bidang *palemahan*, yaitu terciptanya lingkungan Kota Denpasar yang sehat, asri, bersih, dan indah, melalui tata ruang dan wilayah, penyediaan fasilitas umum, serta ruang publik yang berkualitas sehingga mampu menghadirkan kenyamanan bagi masyarakat dalam beraktivitas dan berkreativitas.

Capaian pembangunan di bidang *palemahan* tersebut diukur dengan menilai persepsi masyarakat Kota Denpasar terhadap lima indikator yang disebutkan di atas (I<sub>1</sub> – I<sub>5</sub>) seperti tertuang dalam tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 5.15  
Kualitas Lingkungan

Kecamatan	Indikator				Indeks Kumulatif
	SI <sub>1</sub>	SI <sub>2</sub>	SI <sub>3</sub>	SI <sub>4</sub>	
Denpasar Timur	81,75	81,50	81,25	81,00	81,38
Denpasar Selatan	81,25	80,75	78,65	78,60	79,81
Denpasar Barat	80,40	79,50	78,25	78,40	79,13
Denpasar Utara	81,25	80,65	80,70	80,80	80,85
	81,16	80,60	79,71	79,70	<b>80,30</b>

Dari tabel 5.15 tersebut dapat dipahami bahwa indikator kualitas lingkungan di Kota Denpasar masuk katagori **Sangat Baik (80,30%)**. Seluruh subindikator memberikan kontribusi yang cenderung merata terhadap indeks kumulatif. Namun subindikator polusi udara, serta kondisi drainase dan trotoar jalan hanya berkatagori **Baik** (di bawah **80**). Artinya, kedua subindikator ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah Kota Denpasar. Memburuknya polusi udara akibat kendaraan bermotor yang semakin padat tentu dapat berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Sementara itu, sistem drainase yang tidak berfungsi optimal menyebabkan banjir di beberapa ruas jalan. Selanjutnya, indeks kinerja pengelolaan sampah di Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel 5.16, berikut ini.

Tabel 5.16  
Kinerja Pengelolaan Sampah

Kecamatan	Indikator				Indeks Kumulatif
	SI <sub>1</sub>	SI <sub>2</sub>	SI <sub>3</sub>	SI <sub>4</sub>	
Denpasar Timur	78,25	78,50	79,10	80,15	79,00
Denpasar Selatan	78,50	79,45	79,50	79,25	79,18
Denpasar Barat	79,40	78,50	78,35	79,30	78,89
Denpasar Utara	79,50	79,50	79,30	80,10	79,60
	78,91	78,99	79,06	79,70	<b>79,16</b>

Dari tabel 5.16 tersebut dapat dipahami bahwa indikator kinerja pengelolaan sampah di Kota Denpasar berkatagori **Baik (79,16%)**. Seluruh subindikator memberikan kontribusi yang relatif merata terhadap indeks kumulatif. Pengelolaan sampah memang menjadi tantangan besar bagi masyarakat Kota Denpasar seiring dengan peningkatan jenis dan volume sampah yang dihasilkan. Sementara itu, kinerja pengelolaan sampah belum optimal dan kesadaran warga untuk mengolah

sampah secara mandiri juga masih rendah. Artinya, kinerja pengelolaan sampah ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Kota Denpasar karena indikator ini posisinya paling rendah di antara indikator-indikator lain. Selanjutnya, indeks kinerja pengelolaan sampah di Kota Denpasar dapat disimak pada tabel 5.17, di bawah ini.

Tabel 5.17  
Kualitas Infrastruktur Publik

Kecamatan	Indikator				Indeks Kumulatif
	SI <sub>1</sub>	SI <sub>2</sub>	SI <sub>3</sub>	SI <sub>4</sub>	
Denpasar Timur	78,55	81,00	83,15	82,65	81,34
Denpasar Selatan	79,00	81,15	83,55	83,85	81,89
Denpasar Barat	80,40	80,50	82,68	83,55	81,78
Denpasar Utara	80,50	81,55	83,95	83,65	82,41
	79,61	81,05	83,34	83,42	<b>81,86</b>

Dari tabel 5.17 tersebut dapat dipahami bahwa indikator kualitas infrastruktur publik di Kota Denpasar masuk katagori **Sangat Baik (81,86%)**. Subindikator infrastruktur pendidikan dan pelayanan publik menjadi faktor pengungkit bagi kedua subindikator lainnya, terutama infrastruktur transportasi yang dinilai **Baik** (di bawah **80**). Artinya, infrastruktur transportasi perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Kota Denpasar terutama jika melihat kondisi kemacetan yang kian parah belakangan ini. Selanjutnya, indeks kualitas tata ruang dan wilayah di Kota Denpasar dapat disimak pada tabel 5.18, di bawah ini.

Tabel 5.18  
Kualitas Tata Ruang dan Wilayah

Kecamatan	Indikator				Indeks Kumulatif
	SI <sub>1</sub>	SI <sub>2</sub>	SI <sub>3</sub>	SI <sub>4</sub>	
Denpasar Timur	80,15	78,55	81,25	80,52	80,12
Denpasar Selatan	79,55	78,95	80,20	79,60	79,58
Denpasar Barat	80,35	77,75	80,45	79,45	79,50
Denpasar Utara	80,55	78,65	82,55	82,50	81,06
	80,15	78,48	81,11	80,51	<b>80,07</b>

Dari tabel 5.18 tersebut dapat dipahami bahwa indikator tata ruang dan wilayah di Kota Denpasar dapat dikategorikan **Sangat Baik (80,07%)**. Namun subindikator eksistensi lahan

pertanian dan jalur hijau hanya dinilai **Baik** (di bawah **80**). Hal ini tidak lepas dari alih fungsi lahan yang semakin massif, dan banyak jalur hijau yang juga beralih fungsi untuk keperluan lainnya. Artinya, subindikator ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Kota Denpasar terutama penegakan regulasi mengenai tata ruang dan wilayah. Berikutnya, indeks kualitas ruang publik di Kota Denpasar dapat disimak pada tabel 5.19, di bawah ini.

Tabel 5.19  
Kualitas Ruang Publik

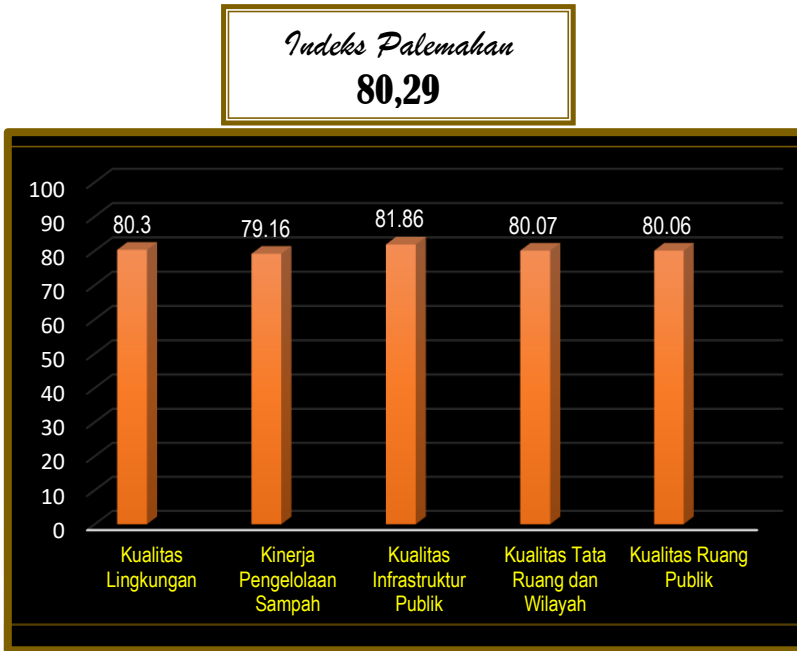
Kecamatan	Indikator				Indeks Kumulatif
	SI <sub>1</sub>	SI <sub>2</sub>	SI <sub>3</sub>	SI <sub>4</sub>	
Denpasar Timur	80,35	80,15	80,35	80,25	80,28
Denpasar Selatan	80,25	79,50	80,50	80,00	80,06
Denpasar Barat	79,75	79,45	79,45	79,05	79,43
Denpasar Utara	80,65	80,55	80,30	80,35	80,46
	80,25	79,91	80,15	79,91	<b>80,06</b>

Dari tabel 5.19 tersebut dapat dipahami bahwa indikator kualitas ruang publik di Kota Denpasar dapat dikategorikan **Sangat Baik (80,06%)**. Akan tetapi subindikator ketersediaan lahan parkir dan kondisi fasilitas umum di ruang publik hanya dinilai **Baik** (di bawah **80**). Lahan parkir yang mengambil ruas jalan kerap dikeluhkan masyarakat. Demikian pula dengan kondisi fasilitas umum di ruang-ruang publik banyak yang tidak berfungsi baik, misalnya toilet yang berbau tidak sedap. Artinya, subindikator ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Kota Denpasar.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap lima indikator *palemahan* tersebut di atas, maka indeks *palemahan* di Kota Denpasar dapat disajikan, sebagai berikut.

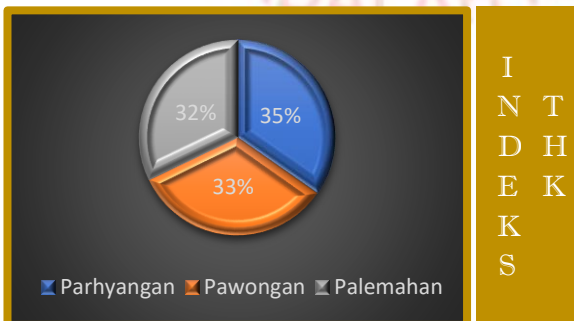
$$\begin{aligned} \text{Indeks Palemahan} &= \frac{I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5}{5} \\ I\text{-}pal &= \frac{80,30 + 79,16 + 81,86 + 80,07 + 80,06}{5} \\ I\text{-}pal &= 80,29 \end{aligned}$$

Diagram 5.3  
Indeks Pawongan di Kota Denpasar Tahun 2024



Berdasarkan pemaparan hasil di atas dapat ditentukan indeks *Tri Hita Karana* dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Indeks THK} &= \frac{I_{par} + I_{paw} + I_{pal}}{3} \\ \text{Indeks THK} &= \frac{86,54 + 82,53 + 80,29}{3} \\ \text{Indeks THK} &= 83,12 \end{aligned}$$



I  
N  
D  
E  
K  
S

**83,12**



5.3 Analisis Kekuatan dan Kelemahan

Analisis kekuatan dan kelemahan dilakukan melalui evaluasi terhadap capaian setiap indikator dan subindikator dengan rerata keseluruhan dari variabel seperti tabel berikut.

Tabel 5.20  
Pengaruh Subindikator terhadap Capaian Indikator

No	Variabel	Indikator (I)	N <sub>r-I</sub>	Subindikator (S <sub>i</sub> )	N <sub>r-Si</sub>	Ket.
1	Parhyangan	I <sub>1</sub>	89,87	SI <sub>1.1</sub>	91,40	Kuat
				SI <sub>1.2</sub>	89,44	Lemah
				SI <sub>1.3</sub>	89,01	Lemah
				SI <sub>1.4</sub>	89,64	Lemah
		I <sub>2</sub>	87,62	SI <sub>2.1</sub>	87,05	Lemah
				SI <sub>2.2</sub>	87,51	Lemah
				SI <sub>2.3</sub>	88,86	Kuat
				SI <sub>2.4</sub>	88,03	Kuat
		I <sub>3</sub>	87,61	SI <sub>3.1</sub>	88,01	Kuat
				SI <sub>3.2</sub>	87,83	Kuat
				SI <sub>3.3</sub>	86,98	Lemah
				SI <sub>3.4</sub>	87,61	Kuat
		I <sub>4</sub>	85,57	SI <sub>4.1</sub>	86,50	Kuat
				SI <sub>4.2</sub>	85,31	Lemah
				SI <sub>4.3</sub>	86,31	Kuat
				SI <sub>4.4</sub>	84,15	Lemah
		I <sub>5</sub>	82,02	SI <sub>5.1</sub>	81,71	Lemah
				SI <sub>5.2</sub>	81,94	Lemah
				SI <sub>5.3</sub>	81,74	Lemah
				SI <sub>5.4</sub>	82,71	Kuat
No	Variabel	Indikator (I)	N <sub>r-I</sub>	Subindikator (S <sub>i</sub> )	N <sub>r-Si</sub>	Ket.
2	Pawongan	I <sub>1</sub>	81,82	SI <sub>1.1</sub>	81,85	Kuat
				SI <sub>1.2</sub>	81,30	Lemah
				SI <sub>1.3</sub>	81,70	Lemah
				SI <sub>1.4</sub>	82,48	Lemah
		I <sub>2</sub>	82,44	SI <sub>2.1</sub>	82,50	Kuat
				SI <sub>2.2</sub>	82,36	Lemah
				SI <sub>2.3</sub>	82,31	Lemah
				SI <sub>2.4</sub>	82,60	Kuat
		I <sub>3</sub>	83,20	SI <sub>3.1</sub>	83,74	Kuat
				SI <sub>3.2</sub>	83,53	Kuat
				SI <sub>3.3</sub>	83,54	Kuat
				SI <sub>3.4</sub>	82,95	Lemah
		I <sub>4</sub>	81,58	SI <sub>4.1</sub>	81,65	Kuat
				SI <sub>4.2</sub>	81,80	Kuat
				SI <sub>4.3</sub>	81,45	Lemah
				SI <sub>4.4</sub>	81,40	Lemah

		I <sub>5</sub>	83,42	SI <sub>5,1</sub>	83,41	Lemah
				SI <sub>5,2</sub>	83,50	Kuat
				SI <sub>5,3</sub>	83,30	Lemah
				SI <sub>5,4</sub>	83,48	Kuat
No	Variabel	Indikator (I)	N <sub>r-I</sub>	Subindikator (S <sub>i</sub> )	N <sub>r-Si</sub>	Ket.
3	Palemahan	I <sub>1</sub>	80.30	SI <sub>1,1</sub>	81,16	Kuat
				SI <sub>1,2</sub>	80,60	Kuat
				SI <sub>1,3</sub>	79,71	Lemah
				SI <sub>1,4</sub>	79,70	Lemah
		I <sub>2</sub>	79,16	SI <sub>2,1</sub>	78,91	Lemah
				SI <sub>2,2</sub>	78,99	Lemah
				SI <sub>2,3</sub>	79,06	Lemah
				SI <sub>2,4</sub>	79,70	Kuat
		I <sub>3</sub>	81.86	SI <sub>3,1</sub>	79,61	Lemah
				SI <sub>3,2</sub>	81,05	Lemah
				SI <sub>3,3</sub>	83,34	Kuat
				SI <sub>3,4</sub>	83,42	Kuat
		I <sub>4</sub>	80,07	SI <sub>4,1</sub>	80,15	Kuat
				SI <sub>4,2</sub>	78,48	Lemah
				SI <sub>4,3</sub>	81,11	Kuat
				SI <sub>4,4</sub>	80,51	Kuat
		I <sub>5</sub>	80,06	SI <sub>5,1</sub>	80,25	Kuat
				SI <sub>5,2</sub>	79,91	Lemah
				SI <sub>5,3</sub>	80,15	Kuat
				SI <sub>5,4</sub>	79,91	Lemah

Tabel 5.21  
Pengaruh Indikator terhadap Capaian Variabel

No	Variabel	I <sub>thk</sub>	Indikator (I)	N <sub>RI-par</sub>	Ket.
1	Parhyangan	86,56	I <sub>1</sub>	89,87	Kuat
			I <sub>2</sub>	87,62	Kuat
			I <sub>3</sub>	87,61	Kuat
			I <sub>4</sub>	85,57	Lemah
			I <sub>5</sub>	82,02	Lemah
2	Pawongan	82,53	I <sub>1</sub>	81,82	Lemah
			I <sub>2</sub>	82,44	Lemah
			I <sub>3</sub>	83,20	Kuat
			I <sub>4</sub>	81,58	Lemah
			I <sub>5</sub>	83,52	Kuat
3	Palemahan	80,29	I <sub>1</sub>	80.30	Kuat
			I <sub>2</sub>	79,16	Lemah
			I <sub>3</sub>	81,86	Kuat
			I <sub>4</sub>	80,07	Lemah
			I <sub>5</sub>	80,06	Lemah

Berdasarkan tabel 5.21 di atas dapat dianalisis hal-hal penting, sebagai berikut.

- (1) *Parhyangan* memberikan kontribusi terbesar dalam pencapaian indeks *Tri Hita Karana* Kota Denpasar. Kelemahan pada variabel *parhyangan* terletak pada indikator [4] dan [5]. Artinya bahwa Pemerintah Kota Denpasar perlu untuk meningkatkan kebebasan dan kenyamanan beribadah bagi setiap umat beragama, serta meningkatkan peran lembaga keagamaan.
- (2) *Pawongan* harus mendapatkan perhatian yang lebih serius dari Pemerintah Kota Denpasar. Kekuatan *pawongan* pada indikator [3] dan [5], tetapi indikator [1], [2], dan [4] masih lemah. Artinya, Pemerintah Kota Denpasar harus mendorong pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi; meningkatkan keterbukaan akses informasi publik; serta menjaga stabilitas kamtibmas secara konsisten.
- (3) *Palemahan* merupakan bidang yang paling lemah di antara bidang-bidang yang lain. Indikator [1] dan [3] kuat, tetapi indikator [2], [4], dan [5] lemah. Artinya, Pemerintah Kota Denpasar harus memperbaiki tata kelola sampah; menegakkan regulasi tata ruang dan wilayah; serta meningkatkan kualitas ruang publik.

5.4 Analisis Komparasi

Perbandingan indeks *Tri Hita Karana* di Kota Denpasar tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel 5.22, berikut ini.

Tabel 5.22  
Perbandingan Indeks *Tri Hita Karana* tahun 2023 dan 2024

VARIABEL	2023	2024	Up	Down
<i>Parhyangan</i>	84,67	86,56	1,89	-
<i>Pawongan</i>	81,71	82,53	0.82	-
<i>Palemahan</i>	80,19	80,29	0.10	-
INDEKS THK	82,19	83,12	0.93	-

Data pada tabel 5.22 di atas menunjukkan bahwa indeks *Tri Hita Karana* di Kota Denpasar tahun 2024 mengalami peningkatan **0,93** sehingga dapat dikatakan telah memenuhi target RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar per tahun 2024, yakni sebesar **83**. Kendatipun demikian, peningkatan indeks tertinggi dicapai pada bidang *parhyangan* yang memiliki kesenjangan cukup signifikan dengan indeks *pawongan* dan *palemahan*. Artinya, kinerja pembangunan di kedua bidang tersebut (*pawongan* dan *palemahan*) harus lebih ditingkatkan dengan program-program yang lebih kreatif, inovatif, aplikatif, dan berkelanjutan.



## BAB VI

# PENUTUP

---

### 6.1 Simpulan

Berdasarkan seluruh paparan di atas dapat disimpulkan indeks *Tri Hita Karana* di Kota Denpasar tahun 2024 sebagai akumulasi tiga variabel penyusunnya, yakni *parhyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*. sebagai berikut:

1. Indeks *Parhyangan* di Kota Denpasar adalah 86,56
2. Indeks *Pawongan* di Kota Denpasar adalah 82,53
3. Indeks *Palemahan* di Kota Denpasar adalah 80,29
4. Indeks *Tri Hita Karana* di Kota Denpasar adalah **83,12**

### 6.2 Rekomendasi

Berdasarkan simpulan tersebut direkomendasikan tiga hal kepada Pemerintah Kota Denpasar untuk meningkatkan kinerja pembangunan berbasis budaya yang selaras dengan nilai-nilai *Tri Hita Karana*, sebagai berikut.

1. Pembangunan bidang *parhyangan* memiliki daya ungkit yang cukup besar terhadap keseluruhan capaian indeks *Tri Hita Karana* di Kota Denpasar. Oleh sebab itu, indeks *parhyangan* harus dipertahankan dan ditingkatkan agar kesadaran keagamaan masyarakat semakin meningkat, dan seluruh umat beragama mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Peran lembaga keagamaan juga harus ditingkatkan untuk mensukseskan pembangunan bidang *parhyangan*, sekaligus menjadi mitra pemerintah untuk menggerakkan partisipasi umat beragama dalam menjalankan roda pembangunan.
2. Pembangunan bidang *pawongan* perlu ditingkatkan lagi karena manusia merupakan kunci dari semua hubungan harmonis yang tercakup dalam *Tri Hita Karana*. Kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kota Denpasar harus



terus ditingkatkan, baik *hard skill* maupun *soft skill*-nya. Kemajuan teknologi harus disikapi dengan menyiapkan generasi muda yang kreatif dan inovatif, namun mereka juga harus memiliki kecintaan dan kebanggaan budaya sebagai warga Kota Denpasar.

3. Pembangunan di bidang *palemahan* perlu ditingkatkan karena ini menjadi ruang hidup bagi seluruh masyarakat Kota Denpasar. *Palemahan* bukan saja lingkungan fisik, tetapi sebuah ranah (*field*) yang meniscayakan seluruh potensi dan sumber daya dapat berkembang optimal.



## **DAFTAR PUSTAKA**

- Chaplin, J. P. 2008. *Kamus Psikologi Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Filedman, R. S. 1999. *Understanding Psychology*. Singapore: McGrow Hill College.
- Geriya, I. W. 2010. *Kebudayaan Unggul, Inventori Unsur Unggulan Sebagai Basis Kota Denpasar Kreatif*. Denpasar: BAPPEDA Kota Denpasar.
- Kumbara, A. A. N. A, & Sutrisno, N. 2017. *Indeks Partisipasi Krama dalam Pelaksanaan Tri Hita Karana di Kota Denpasar*. Denpasar: Kerjasama Universitas Udayana dan Bappeda Kota Denpasar.
- Lash, S. 2004. *Sosiologi Postmodernisme*. Yogyakarta: Kanisius.
- Neuman. W. L. 2006. *Sosial research method: qualitative and quantitative approaches. (Third Edition)*. USA.
- Poespoprodjo, W. 1987. *Interpretasi: Beberapa Catatan Pendekatan Filsafatnya*. Malang: YA3 Press.
- Rakhmat, J. 1996. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rasyid, Moh. Ryas. 1997. *Makna Pemerintahan (Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan)*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Pemerintah Kota Denpasar. 2021. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar 2021-2026*. Denpasar: Bappeda Kota Denpasar.

- Robbins, S. P. 2007. *Prilaku Organisasi, buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sanderson, S. K. 2003. *Makrososiologi, Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Silalahi, U. 2015. *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Setiadi, N. J. 2013. *Prilaku Konsumen : Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian, Pemasaran*. Jakarta: Prenada Media.
- Sobur, A. 2003. *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sudjana, N. 1992. *Statistika*. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sztompka, P. 2001. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media.
- Triguna, I. B. G. Y. 1997. "Pengaruh Mobilitas Kelas dan Konflik terhadap Penafsiran Kembali Simbolisme Masyarakat Hindu di Bali". *Disertasi* – tidak dipublikasikan. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Walgito, B. 2005. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi.
- Wiana, K. 2012. *Tri Hita Karana Menurut Konsep Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Winkel, W.S. 1996. *Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar*. Jakarta: Gramedia.
- Webster Merriam-Webster Dictionary (2019) versi online dalam <https://www.merriam-webster.com/>
- Zigmund, W. G. 1997. *Bussiness Research Methods*. New York.

KUESIONER

1. Identitas Responden

Nama responden : ..... boleh dikosongkan\*

Usia : ..... tahun

Pendidikan : ☐ SD; ☐ SMP; ☐ SMA-sederajat;  
☐ Diploma/Sarjana; ☐ Pascasarjana  
beri tanda centang (✓) pada pilihan jawaban\*

Pekerjaan : .....

Agama : ☐ Hindu ☐ Islam ☐ Katolik ☐ Kristen ☐ Buddha  
☐ Konghucu  
beri tanda centang (✓) pada pilihan jawaban\*

Alamat : Dusun...../ Desa.....  
☐ Denpasar Utara ☐ Denpasar Timur  
☐ Denpasar Selatan ☐ Denpasar Barat  
beri tanda centang (✓) pada kecamatan yang dipilih\*

2. Pertanyaan

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda centang (✓) pada kolom jawaban yang tersedia.

- SS : Sangat Setuju  
S : Setuju  
R : Ragu-ragu  
TS : Tidak Setuju  
STS : Sangat Tidak Setuju

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Saya sudah mendapatkan pendidikan agama di sekolah					
2	Saya mendapatkan pendidikan agama di keluarga					
3	Saya mendapatkan pendidikan agama di masyarakat dengan mengikuti pembinaan agama, belajar dari tokoh agama, dan terlibat langsung dalam kegiatan keagamaan					
4	Saya mendapatkan pendidikan agama melalui media, menonton <i>youtube</i> , membaca buku agama, dan sumber-sumber yang lain.					
5	Sikap keagamaan yang terlalu fanatik, ekstrem dan radikal tidak pantas diterapkan di masyarakat.					
6	Setiap umat beragama harus menjunjung tinggi kearifan lokal					

7	Saya tidak pernah mendapatkan diskriminasi dari umat beragama lain					
8	Saya biasa berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain yang berbeda agama					
9	Saya tidak pernah merasa terganggu saat menjalankan ibadah sehari-hari					
10	Saya tidak pernah merasa terganggu saat melaksanakan ibadah yang melibatkan banyak umat					
11	Saya merasakan kegiatan ibadah di tempat suci berjalan baik-baik saja tanpa ada gangguan					
12	Saya sering mendapatkan dukungan atau bantuan dari umat lain saat melaksanakan ibadah keagamaan di rumah dan di tempat suci					
13	Saya menilai bahwa di antara sesama umat kami sudah hidup rukun dan tidak pernah terjadi konflik					
14	Saya menilai bahwa kerukunan antarumat beragama di Kota Denpasar sudah sangat baik					
15	Saya menilai bahwa hubungan umat beragama dengan Pemerintah Kota Denpasar terbina dengan baik					
16	Saya menilai bahwa Pemerintah Kota Denpasar sudah berperan dalam mencegah dan mengatasi terjadinya konflik umat beragama, serta masalah keagamaan lainnya.					
17	Saya menilai bahwa lembaga keagamaan sudah berperan dan berfungsi dalam memberikan pembinaan keagamaan					
18	Saya menilai bahwa lembaga keagamaan sudah berperan dan berfungsi dalam menyelesaikan masalah-masalah keumatan					
19	Saya menilai bahwa lembaga keagamaan sudah terlibat dan berpartisipasi aktif dalam mendukung kebijakan serta program-program pemerintah.					
20	Saya selalu mematuhi arahan, imbauan, dan keputusan dari lembaga keagamaan di agama yang saya anut.					



21	Saya sudah mendapatkan kemudahan dalam mengakses pendidikan pada semua jenjang (SD, SMP, SMA) tanpa kendala yang berarti.					
22	Saya sudah mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas di Kota Denpasar.					
23	Saya tidak mendapatkan kesulitan dalam mengakses lapangan kerja, izin usaha, dan permodalan.					
24	Saya selalu berusaha mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, serta ekonomi yang lebih baik bagi saya pribadi dan keluarga					
25	Saya menilai bahwa usaha Pemerintah Kota Denpasar untuk mengatasi masalah gelandangan, pengemis, dan premanisme sudah optimal					
26	Saya menilai bahwa upaya Pemerintah Kota Denpasar dalam memberdayakan penyandang disabilitas, perempuan, perlindungan anak, dan lanjut usia sudah optimal					
27	Saya menilai bahwa upaya Pemerintah Kota Denpasar dalam pengembangan seni dan budaya sudah optimal.					
28	Saya menilai bahwa masyarakat sudah dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan di Kota Denpasar					
29	Saya menilai bahwa kebijakan dan program-program Pemerintah Kota Denpasar sudah disosialisasikan kepada masyarakat					
30	Saya sangat mudah mengakses informasi publik di Kota Denpasar melalui media internet					
31	Saya menilai bahwa ruang-ruang publik sudah banyak dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat					
32	Saya menilai bahwa pembangunan di desa/kelurahan tempat saya tinggal sudah dilaksanakan secara transparan					

33	Saya menilai bahwa pelayanan publik melalui media digital di Kota Denpasar sangat mudah diakses dan membantu masyarakat					
34	Saya menilai bahwa kualitas layanan publik di Kota Denpasar sudah sesuai dengan harapan masyarakat.					
35	Saya menilai bahwa sikap dan perilaku petugas pelayanan publik sudah sesuai dengan prinsip 3 S (salam, senyum, sapa)					
36	Saya tidak pernah mengalami diskriminasi ketika mengurus pelayanan administratif di Kota Denpasar					
37	Saya menilai bahwa kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kota Denpasar sudah kondusif					
38	Saya menilai bahwa Pemerintah Kota Denpasar sudah berupaya optimal untuk menjaga kondisi Kamtibmas agar tetap kondusif					
39	Saya selalu berusaha untuk berperan serta aktif dalam menjaga Kamtibmas di lingkungan tempat tinggal saya					
40	Saya menilai bahwa kepolisian, TNI, Pemerintah, dan masyarakat Kota Denpasar sudah bersinergi dalam menjaga kondusivitas Kamtibmas					
41	Saya menilai bahwa kualitas lingkungan di Kota Denpasar cukup baik					
42	Saya tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih dan sehat bagi kebutuhan sehari-hari					
43	Saya menilai bahwa kondisi polusi udara di Kota Denpasar masih terkendali dan aman.					
44	Saya menilai bahwa peran Pemerintah Kota Denpasar dalam menjaga kondisi lingkungan hidup dan kebersihan sudah optimal					
45	Saya menilai bahwa penanggulangan sampah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Denpasar sudah optimal					

46	Saya selalu berusaha untuk mengelola sampah rumah tangga secara mandiri sebelum diambil petugas atau dibuang ke TPA/TPST di sekitar wilayah tempat tinggal saya					
47	Warga di lingkungan tempat tinggal saya aktif bergotong royong untuk menjaga kebersihan, keasrian, dan kelestarian lingkungan					
48	Saya menilai bahwa masyarakat dan pemerintah sudah bersinergi dalam menjaga kebersihan, keasrian, dan kelestarian lingkungan di Kota Denpasar					
49	Saya menilai bahwa infrastruktur transportasi darat (jalan raya dan moda transportasi umum), serta pelabuhan di Kota Denpasar sudah sesuai harapan masyarakat					
50	Saya menilai bahwa infrastruktur perekonomian (tempat usaha, penyedia barang dan jasa, serta perbankan) di Kota Denpasar sudah optimal guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat					
51	Saya menilai bahwa infrastruktur pelayanan publik (kantor pemerintah dan Puskesmas) sudah sesuai harapan masyarakat					
52	Saya menilai bahwa fasilitas-fasilitas umum (tempat berolah raga dan aktivitas lainnya) di Kota Denpasar terpelihara dengan baik					
52	Saya menilai bahwa tata ruang dan wilayah di Kota Denpasar sudah tertata dengan baik					
53	Saya menilai bahwa kualitas ruang publik (sekolah, Puskesmas, rumah sakit, dan pusat layanan publik) sudah sesuai harapan masyarakat					
54	Saya menilai bahwa taman bermain dan tempat rekreasi keluarga sudah banyak tersedia dan kualitasnya sudah sesuai harapan masyarakat					
55	Saya menilai bahwa ruang terbuka hijau di Kota Denpasar sudah tersedia dengan baik dan mampu mengurangi polusi udara					

PERTANYAAN TERBUKA

1. Menurut saudara, apa hal penting yang harus ditingkatkan dalam pembangunan bidang keagamaan di Kota Denpasar?

.....

.....

.....

.....

2. Menurut saudara, apa hal penting yang harus ditingkatkan dalam pembangunan sumber daya manusia, dan sosial budaya di Kota Denpasar?

.....

.....

.....

.....

3. Menurut saudara, apa hal penting yang harus ditingkatkan dalam pembangunan lingkungan hidup dan infrastruktur di Kota Denpasar?

.....

.....

.....

